

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIAATAN TAHUNAN 2019



PENGADILAN NEGERI SINABANG

Jalan Tgk Diujung No. 406 Sinabang – Kabupaten Simeulue – Provinsi Aceh 23891

Telpon (0650)-21043, 21042 Faximile (0650) - 21043

Website : www.pn-sinabang.go.id

E-mail : pnsinabang@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR



Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini adalah sebagai tolak ukur sejauh mana tugas pokok dan fungsi yang diemban serta implementasi terhadap keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik. Dengan kerja nyata yang ditampilkan dalam laporan Pelaksanaan kegiatan tahun 2019 ini, diharapkan dapat menjawab berbagai kritikan masyarakat terhadap kinerja pengadilan sebagai lembaga penegak hukum.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Negeri Sinabang Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan kegiatan selama satu tahun anggaran pada tahun 2019.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas dan fungsi yang telah kami laksanakan masih terdapat kekurangan-kekurangan, baik di bidang administrasi teknis yudisial maupun administrasi non teknis yudisial (umum), oleh karena itu pengawasan, pembinaan serta dukungan penunjang dalam pelaksanaan tugas sangat kami harapkan agar kami dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Laporan Pelaksana Kegiatan Tahunan 2019 ini, kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk peningkatan kinerja pada pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada tahun-tahun berikutnya.

Ketua Pengadilan Negeri Sinabang



MUHIFUDDIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEADAAN PERAKRA DI PERADILAN UMUM.....	4
A. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA	4
B. PENYELESAIAN PERKARA.	5
- JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS	5
- JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU	5
- JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM.....	6
- JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI	6
- JUMLAH PERKARA ANAK YANG BEHASIL MELALUI DIVERSI	6
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKAT ISO PENGADILAN).	7
- POSBAKUM	8
- PELAYANAN TERPADU	9
- PERKARA PRODEO.....	9
BAB. III SUMBER DAYA MANUSIA	11
- MUTASI	14
- PROMOSI :	14
- Pensiun :	15
- DIKLAT	15
BAB . V PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	16
A. PENGELOLAAN KEUANGAN.....	16
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA.....	17
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	22
- Implementasi E-court di Lingkungan Peradilan Umum.	22
- Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum.....	24

Bab. V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	27
- Akreditasi Penjaminan Mutu.	27
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	27
- Inovasi Pelayanan Publik.....	28
BAB VI PENGAWASAN.....	30
A. Internal.....	30
B. EVALUASI.....	32
BAB. VII PENUTUP	34
A. KESIMPULAN	34
B. REKOMENDASI	34

BAB I

PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Sinabang merupakan sebagai salah satu Pengadilan tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung, sebagai penyelenggara peradilan tingkat pertama. Pengadilan Negeri Sinabang turut menjadi penentu keberhasilan Mahkamah Agung dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman (yudikatif) dan manajemen dibidang administratif, personil, financial, serta sarana dan prasarana, sebagai kepanjangan tangan Mahkamah Agung dalam penegakan hukum, Khususnya di bidang peradilan umum.

Mahkamah Agung adalah salah satu pilot projek reformasi birokrasi di Indonesia tentunya berkewajiban untuk mendorong pembaharuan yang menyeluruh, sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan birokrasi di lembaga peradilan yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Peningkatan peran Pengadilan Negeri Sinabang mengacu pada *Blue Print* (Cetak Biru) Mahkamah Agung RI 2010 - 2035, mengembangkan 7 (tujuh) area yang telah dirumuskan dalam *Blue Print* (Cetak Biru) Mahkamah Agung, yaitu :

1. Kepemimpinan dan Managemen Pengadilan ;
2. Kebijakan Peradilan ;
3. Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana dan Anggaran ;
4. Penyelenggaraan Persidangan ;
5. Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Keadilan ;
6. Pelayanan Pengadilan Yang Terjangkau ;
7. Kepercayaan dan Keyakinan Masyarakat Pada Pengadilan ;.

Selanjutnya untuk mewujudkan langkah-langkah pembaharuan tersebut, sesuai tupoksi yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan di Bidang Peradilan, dalam tubuh organisasi Badan Peradilan telah dibentuk dan dilengkapi aparatur yang lengkap dan memadai, dan telah dipilah dalam bagian-bagian. Tugas di Bidang Administrasi Teknis dilaksanakan oleh aparatur Teknis Yudisial yaitu Hakim, Panitera dan Jurusita, sedangkan di Bidang Administrasi Umum dilaksanakan oleh Aparatur Non Teknis Yudisial yaitu Sekretaris, Para Kasubbag berserta staf.

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, dengan dilandasi oleh rasa tanggungjawab dan kebersamaan, seluruh bagian- bagian dari Aparatur Teknis Yudisial dan

Non Teknis Yudisial yang ada di Pengadilan Negeri Sinabang guna mewujudkan visi Pengadilan Negeri Sinabang yaitu “Mewujudkan Pengadilan Negeri Sinabang Yang Agung”, visi tersebut dapat tercapai bila Pengadilan Negeri Sinabang dapat mewujudkan tujuan sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sinabang dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Guna mencapai tujuan tersebut Pengadilan Negeri Sinabang harus menetapkan rencana strategis tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sinabang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*acceso justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Peningkatan kualitas pengawasan.
7. Peningkatan pelayanan publik terhadap pencari keadilan / masyarakat.

Dalam usaha untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategi 5 (Lima) tahun kedepan, Pengadilan Negeri Sinabang mencanangkan Program Jangka Menengah yang merupakan pentahapan dari Program Jangka Panjang serta penyesuaian Program Kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana dalam *Blue Print* Mahkamah Agung RI 2010-2035. Adapun program kegiatan selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan.
2. Peningkatan prasarana dan sarana Peradilan.
3. Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan.
4. Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan.
5. Pengelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Peningkatan Pelayanan Publik terhadap pencari keadilan dan Masyarakat Umum.
7. Menuju Manajemen Perkantoran Modern.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan.

Adapun susunan organisasi Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Data Susunan Organisasi Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2019

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Muhifuddin, SH.,MH
2	Hakim	Restu Ikhlas, SH
3	Hakim	Rahmawan, SH
4	Panitera	Zulkarnaini, SH
5	Sekretaris	Lingga Febriyanti, SH
6	Panmud Pidana	Ayon Aurifan, SH
7	Kasubbag Umum dan Keuangan	Putri Mawar, SE
8	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Andi Pranoto, SH
9	Panitera Pengganti	Aulia Alfacrisy, SH
10	Staf Pelaksana Kepaniteraan Muda Hukum	Mitra Permana, A.Md
11	Staf Pelaksana Kepaniteraan Muda Perdata	Saflin
12	Jurusita Pengganti	Roni

Dengan personel yang ada Pengadilan Negeri Sinabang berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan, mewujudkan cita-cita pembaharuan badan peradilan dan mewujudkan Pengadilan Yang Agung (*Court of Excellence*).

BAB II

KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

A. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Sebagai salah satu pelaksana tugas pokok kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum, Pengadilan Negeri Sinabang memiliki tugas pokok :

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.

Pengadilan Negeri Sinabang wilayah hukumnya meliputi wilayah seluruh Kabupaten Simeulue dengan luas wilayah kurang lebih 2051 km² yang terdiri dari 10 kecamatan sebagai berikut,

1. Kecamatan Simeulue Timur.
2. Kecamatan Simeulue Tengah.
3. Kecamatan Simeulue Barat.
4. Kecamatan Teupah Barat.
5. Kecamatan Teupah Selatan.
6. Kecamatan Teupah Tengah.
7. Kecamatan Teluk Dalam.
8. Kecamatan Alafan.
9. Kecamatan Salang.
10. Kecamatan Simeulue Cut

Berikut disajikan data Keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel : Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Sinabang 2019

No	Perkara	Sisa Tahun 2018	Masuk Tahun 2019	Putus Tahun 2019	Dicabut	Putus Sela	Sisa Perkara Tahun 2019
1	Pidana Biasa	0	44	43	0	2	1
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
3	Pidana Cepat	0	2	2	0	0	0
4	Lalu lintas	0	173	173	0	0	0
5	Pidana Perikanan	0	0	0	0	0	0

6	Pidana Anak	0	4	4	0	0	0
7	Perdata Gugatan	1	3	3	0	0	1
8	Perdata Permohonan	0	28	28	0	0	0
9	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
10	Perlawanan (Derden Verzet)	0	0	0	0	0	0
Jumlah		1					2

B. PENYELESAIAN PERKARA.

- JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS.

Sisa Perkara Pengadilan Negeri Sinabang yang belum diputus pada tahun 2018, telah diputus pada tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : Sisa Perkara Pengadilan Negeri Sinabang yang diputus tahun 2019

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2018	Sisa Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara
1	Perdata	1	1	0
2	Pidana	0	0	0
3	Pidana Anak	0	0	0

- JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Seluruh perkara yang ditangani di Pengadilan Negeri Sinabang pada tahun 2019 dapat diputus tepat waktu. Jumlah perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel : Jumlah Perkara Pengadilan Negeri Sinabang Yang Diputus Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Putusan Tepat Waktu	Putusan Terlambat
1	Perdata	3	3	0
2	Pidana	43	43	0
3	Pidana Anak	4	4	0

- **JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM**

Berikut adalah jumlah perkara pada Pengadilan Negeri Sinabang yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2019.

Tabel : Jumlah Perkara Pengadilan Negeri Sinabang Yang Tidak Melakukan Upaya Hukum Tahun 2019

NO	Jenis perkara	Perkara Putus Tingkat Pertama	Upaya hukum banding	Kasasi	PK
1.	Perdata	3	1	1	0
2.	Pidana	43	2	0	0
3.	Pidana Anak	4	0	0	0

- **JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI**

Berikut adalah jumlah perkara perdata pada Pengadilan Negeri sinabang yang berhasil di mediasi pada tahun 2019.

Tabel : Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi Tahun 2019

No	Jumlah perkara perdata masuk	Jumlah perkara yang di mediasi	Berhasil	Tidak berhasil
1.	3	3	0	3

- **JUMLAH PERKARA ANAK YANG BEHASIL MELALUI DIVERSI**

Berikut adalah jumlah perkara anak pada Pengadilan Negeri Sinabang masuk dalam proses persidangan pada tahun 2019.

Tabel : Jumlah Perkara Anak Tahun 2019

NO	Perkara anak yang masuk	Diversi	Berhasil	Gagal	Ket.
1	4	Tidak	-	-	

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKAT ISO PENGADILAN).

Menurut Komite Akreditasi Nasional (KAN) : Akreditasi adalah pengakuan formal yang diberikan oleh badan akreditasi terhadap kompetensi suatu lembaga atau organisasi dalam melakukan kegiatan penilaian kesesuaian tertentu.

Kegiatan penilaian kelayakan dan kinerja suatu institusi berdasarkan kriteria (standar) yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan sebagaimana diatur dalam Keputusan tertentu

Ruang lingkup dari sistem manajemen Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum mencakup :

- Penerimaan permohonan Akreditasi
- Perencanaan Asesmen dan Akreditasi
- Penerimaan dokumen, evaluasi dokumen, rekomendasi dokumen
- Pelaksanaan Asesmen
- Laporan Asesmen
- Pengambilan Keputusan Akreditasi
- Pengawasan (*Surveilan*).

Ruang lingkup implementasi sistem untuk Pengadilan Negeri meliputi seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit pada Pengadilan Negeri meliputi:

- Manajemen peradilan.
- Administrasi perkara.
- Administrasi persidangan.
- Administrasi umum.
- Pelayanan publik.
- Pengelolaan kas.
- Pengadaan barang dan jasa.
- Pengawasan.
- Penanganan pengaduan.

Unit di Pengadilan Negeri yang melaksanakan kegiatan pelayanan adalah:

- Pimpinan, yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua
- Hakim/ Majelis Hakim
- Panitera
- Sekretaris
- Kepaniteraan, yang terdiri:
 - Panitera Muda Perdata
 - Panitera Muda Pidana
 - Panitera Muda Hukum
 - Panitera Pengganti
- Jurusita
- Kesekretariatan, yang terdiri:
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
 - Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan.

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa / Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul / Prima (*Indonesia Court Performance Excellent – ICPE*)

Pengadilan Negeri Sinabang telah terakreditasi dengan penilaian A (excellent) pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Sinabang berkomitmen untuk tetap menjaga akreditasi tersebut dengan meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan.

- **POSBAKUM**

Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap kantor Pengadilan Negeri Sinabang.

Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu, Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut:

1. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum;
3. Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;

4. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku;
5. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai syarat yang berlaku.

Pada tahun anggaran 2019 Pengadilan Negeri Sinabang Memperoleh anggaran pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan lamanya jam layanan 240 (dua ratus empat puluh) jam layanan, berikut data pelaksanaan Pos bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Sinabang :

Tabel : Pelaksanaan Posbakum Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2019.

No	Triwulan	Realisasi Jam Layanan	Jumlah Masyarakat yang Menerima Layanan	Nama organisasi Pemberi Jasa	Keterangan
1	I	48	11	LKBH Simeulue	
2	II	48	7	LKBH Simeulue	
3	III	60	9	LKBH Simeulue	
4	IV	84	11	LKBH Simeulue	

- PELAYANAN TERPADU

Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai wujud Program Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II dalam Rangka membangun wilayah bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Dengan adanya System Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diharapkan pencari Keadilan dan pengguna layanan Pengadilan dapat dilayani dengan cepat dan maksimal dan Transparan.

- PERKARA PRODEO

Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak-pihak tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim, Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas, Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
3. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
4. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan.

Prosedur permohonan berperkara secara prodeo:

- a. Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan dilampiri dokumen pendukung.
- b. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon.
- c. Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan dokumen pendukung ke Pengadilan, yang berwenang memutus perkara yang dimohonkan tersebut, untuk diputus apakah dikabulkan atau tidak.
- d. Jika permohonan dianggap memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara prodeo. Izin beracara secara prodeo diberikan Pengadilan atas perkara yang diajukan pada tingkatan pengadilan tertentu saja.
- e. Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak dapat berperkara secara prodeo dan pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum.

Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan memperhatikan anggaran yang tersedia. Ketersediaan anggaran tersebut diumumkan kepada masyarakat secara berkala melalui papan pengumuman Pengadilan atau media lain yang mudah diakses. Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Sinabang Tidak tersedia Anggaran perkara Prodeo dalam DIPA.

BAB. III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pengadilan Negeri Sinabang, yang merupakan salah satu Instansi Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja dan Pelayanan amatlah ditentukan dengan dukungan Sumber Daya Manusia baik itu Kualitas maupun Kuantitasnya. Peningkatan SDM Aparatur Peradilan sangatlah perlu untuk terus diasah dan ditingkatkan, demikian juga dengan kuantitas pelaksananya juga perlu dipenuhi.

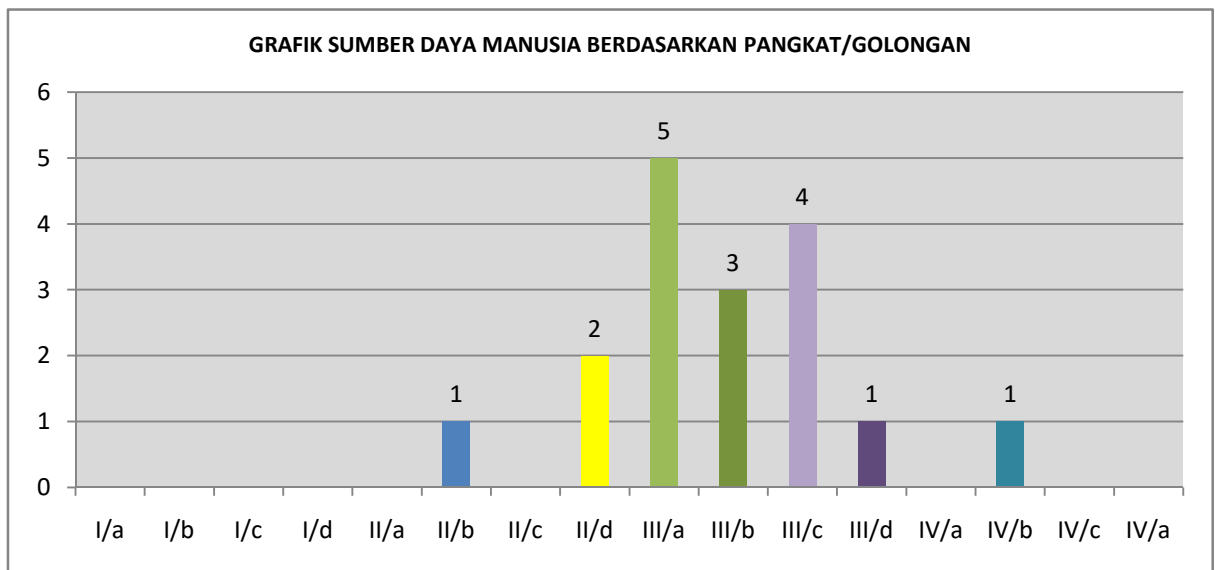
Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Pengadilan Negeri Sinabang dapat kami tampilkan dalam matriks sebagai berikut :

Tabel : Keadaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Pangkat/Golongan	Pendidikan
1.	Muhifuddin, SH.,MH	Ketua	Pembina Tk. I (IV/b)	S2
2.	Restu Ikhlas, SH	Hakim	Penata (III/c)	S2
3.	Rahmawan, SH	Hakim	Penata (III/c)	S1
4.	Zulkarnaini, SH	Panitera	Penata Tk.I (III/d)	S1
5.	Lingga Febriyanti, SH	Sekretaris	Penata (III/c)	S1
6.	Ayon Aurifan, SH	Panmud Pidana	Penata (III/c)	S1
7.	Putri Mawar, SE	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penata Muda Tk. (III/b)	S1
8.	Andi Pranoto, SH	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata Muda Tk. (III/b)	S1
9.	Aulia Alfacrisy, SH	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk. (III/b)	S1
10.	Muhammad Aditia, SH	Calon Hakim	Penata Muda (III/a)	S1
11.	M. Novansyah Merta, SH	Calon Hakim	Penata Muda (III/a)	S1
12.	Fachri Riyan Putra, SH	Calon Hakim	Penata Muda (III/a)	S1
13.	Ahmad Ghali Pratama, SH	Calon Hakim	Penata Muda (III/a)	S1
14.	Mitra Permana, A.Md	Staf Pelaksana Kepaniteraan Muda Hukum	Pengatur Tk. I (II/d)	DIII
15.	Saflin	Staf Pelaksana Kepaniteraan Muda Perdata	Pengatur Tk. I (III/d)	SMA
16.	Roni	Jurusita Pengganti	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	SMA
17.	Wahyu Santosa, SE	CPNS	Penata Muda (III/a)	S1

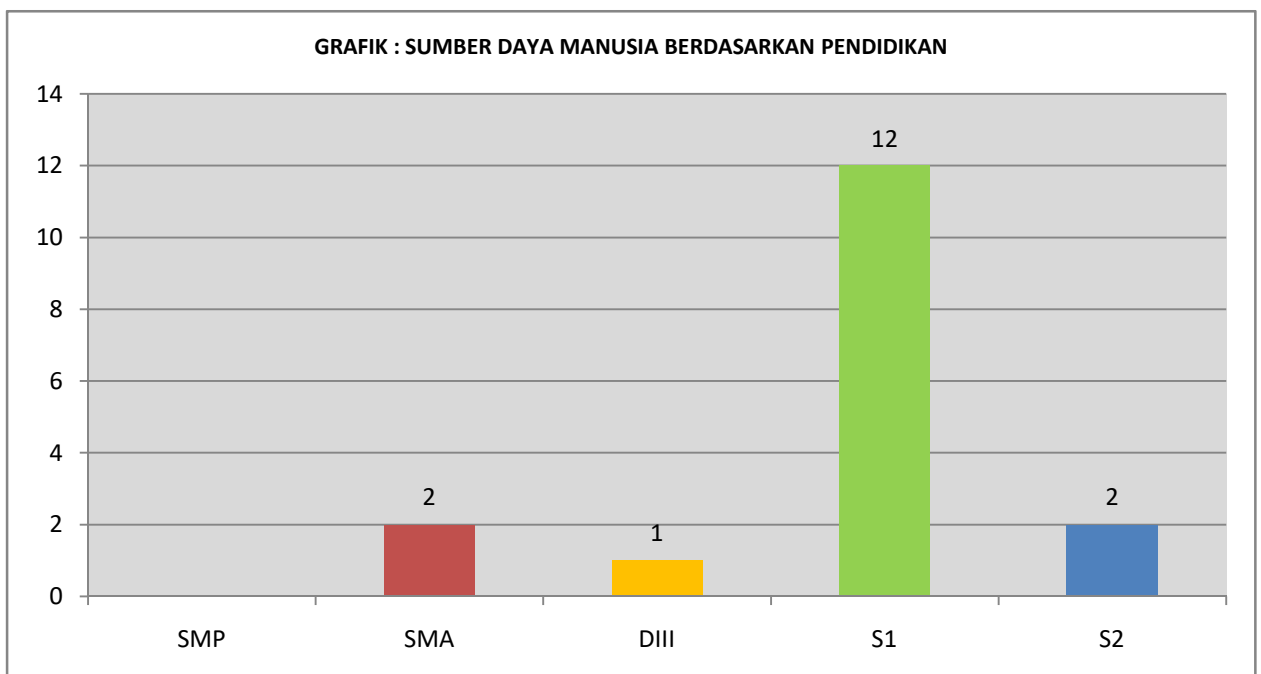
Keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Sinabang berdasarkan Pangkat/Golongan adalah sebagai berikut :

Grafik 1 : Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan.



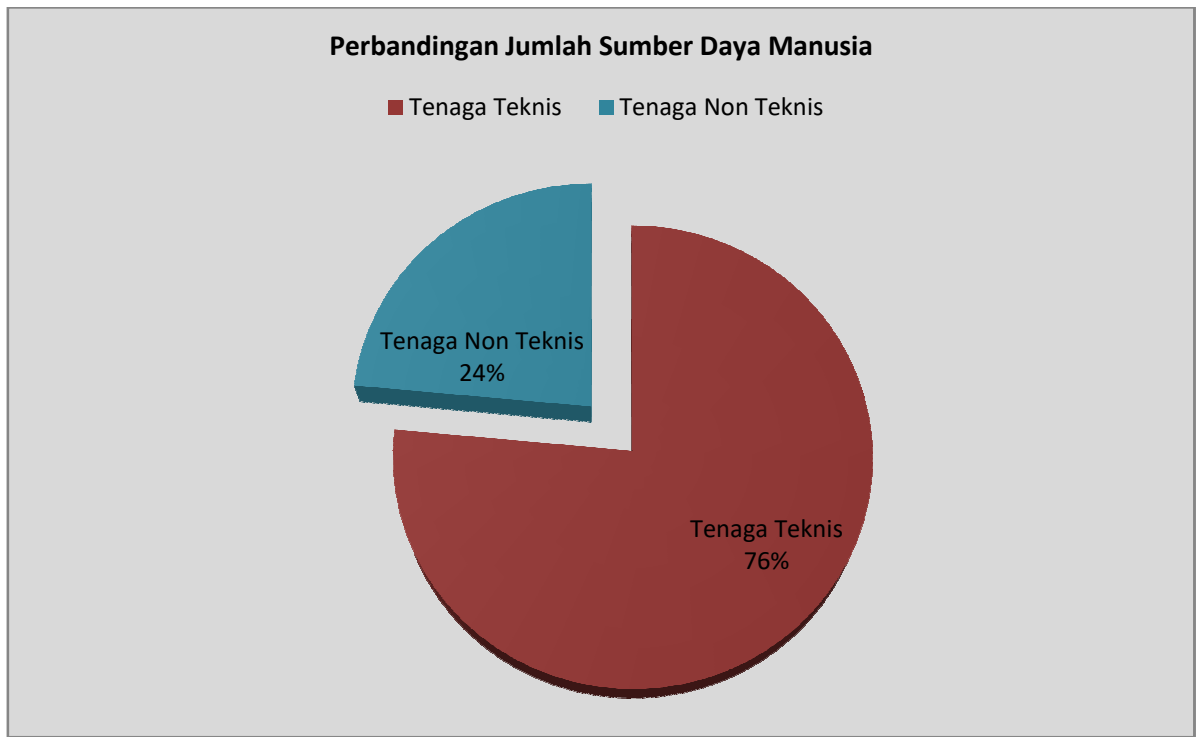
Keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Sinabang berdasarkan Pendidikan adalah sebagai berikut :

Grafik 2 : Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan.



Berikut disajikan perbandingan Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis di Lingkungan Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2019.

Grafik 3 : Perbandingan Jumlah Sumber daya Manusia berdasarkan Tenaga Teknis dan Non Teknis.



Selain Hakim dan Pegawai Negeri Sipil dalam Pelaksanaan kegiatan sehari-hari perkantoran pada Pengadilan Negeri Sinabang juga dibantu oleh tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) berikut data personel tenaga kontrak di Lingkungan Pengadilan Negeri Sinabang pada tahun 2019

Tabel : Tenaga Kontrak (PPNPN)

No	Nama	Tugas	Keterangan
1.	Kasmadi	Pramubakti	
2.	Hairul Mardi	Satpam	
3.	Suhendi	Satpam	
4.	Dedi Ardiansyah, S.H.	Pramubakti	
5.	Harlita, S.H.	Pramubakti	

6.	Rofinul Ikhwan	Pramubakti	
7.	Aminsyah, S.E.	Pramubakti	
8.	Khairuddin	Supir	
9.	Mulia Raironta, S.Kom	Pramubakti	
10.	Sahrul Amin	Supir	
11.	Ahmad Jais	Pramubakti	
12.	Foni Alfira	Pramubakti	

- **MUTASI**

Pada tahun 2019 mutasi masuk dilingkungan Pengadilan Negeri Sinabang adalah sebagai berikut :

Tabel : Mutasi Masuk Tahun 2019

No	Nama	Keterangan	Tanggal
1.	Zulkarnaini, SH	Pindah dari Pengadilan Tinggi	26 februari 2019
2.	Wahyu Santosa, SE	CPNS	8 april 2019
3.	Nanda Bertha Azora A.Md	Pindah melimpah dari Pemda Simeulue	20 mei 2019
4.	Saflin	Pindah melimpah dari Pemda Simeulue	14 mei 2019
5.	Mitra Permana, A.Md	Pindah melimpah dari Pemda Simeulue	28 November 2019

Pada tahun 2019 yang Pegawai mutasi keluar pada lingkungan Pengadilan Negeri Sinabang adalah sebagai berikut :

No	Nama	Keterangan	Tanggal
-	NIHIL	-	-

- **PROMOSI**

Data promosi pada lingkungan Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Keterangan	Tanggal
1.	Zulkarnaini, SH	Dari PP PT Banda Aceh Menjadi Panitera PN Sinabang	26 februari 2019

2.	Ayon Aurifan, SH	Dari Panmud Hukum Menjadi Panmud Pidana Pengadilan Negeri Sinabang	26 februari 2019
3.	Muhammad Aditia, SH	CPNS promosi mejadi PNS	1 mei 2019
4.	M. Novansyah Merta, SH	CPNS promosi mejadi PNS	1 mei 2019
5.	Fachri Riyan Putra, SH	CPNS promosi mejadi PNS	1 mei 2019
6.	Ahmad Ghali Pratama, SH	CPNS promosi mejadi PNS	1 mei 2019

- **PENSIUN**

Pegawai yang pensiun pada tahun 2019:

No	Nama	Keterangan	Tanggal
1.	Nanda Bertha Azora A.Md	Meninggal dunia	30 ovember 2019

- **DIKLAT**

Untuk memenuhi standar pelayanan publik tersebut maka Mahkamah Agung melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia dengan cara mengikutsertakan pegawai Pengadilan Negeri Sinabang untuk mengikuti Pelatihan dan Diklat yang berguna bagi peningkatan kualitas dan kemampuan kerja.

Berikut adalah daftar Pegawai pada Pengadilan Negeri Sinabang yang mengikuti Diklat dan Pelatihan pada tahun 2019 :

Tabel : Berikut Data Diklat sumber Daya Manusia di bidang Teknis tahun 2019

No	Nama	Keterangan	Tanggal
1.	NIHIL		
2.	NIHIL		

Tabel : Berikut data Diklat Sumber Daya Manusia di bidang Non Teknis 2019

No	Nama	Keterangan	Tanggal
1.	Andi Pranoto, SH	Diklat Pim Tingkat IV	16 Mei 2019
2.	Roni	Diklat Bendahara	19 Maret 2019

3.	Wahyu Santosa, SE	LATSAR	Juni 2019
----	-------------------	--------	-----------

BAB . V PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI.

A. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan terdiri dari pengelolaan keuangan perkara dan pengelolaan keuangan DIPA, Berikut data Laporan Keuangan Perkara dan pengelolaan keuangan DIPA Tahun 2019

Tabel : Laporan Keuangan Perkara periode Desember Tahun 2019

No	Nama jenis Penerimaan/pengeluaran	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1.	Saldo Awal	12.581.520,00			
2.	Penerimaan		212.000,00		
3.	Biaya Proses/ATK/Pemberkasan*)			100.000,00	
4.	Biaya Panggilan			2.490.000,00	
5.	Biaya Penerjemah			0,00	
6.	Biaya Pemberitahuan			0,00	
7.	Biaya Sita			0,00	
8.	Biaya Pemeriksaan Setempat			0,00	
9.	Biaya Sumpah			0,00	
10.	Biaya Saksi Ahli			0,00	
11.	Biaya Pengiriman			56.000,00	
12.	Biaya Materai			24.000,00	
13.	PNBP Biaya Pendaftaran			60.000,00	
14.	PNBP Redaksi			40.000,00	
15.	PNBP Lain-lain			20.000,00	
16.	Pengembalian Sisa Panjar			0,00	
17.	Biaya Lain-lain			0,00	
18.	Saldo Akhir				10.003.520,00
	Jumlah	12.581.520,00	212.000,00	2.790.000,00	10.003.520,00

Pada tahun anggaran 2019 Pengadilan Negeri Sinabang memperoleh anggaran sebesar Rp. **2.606.618.000,-** untuk DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan untuk anggaran DIPA 03 Direktorat jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp. **38.100.000,-**.

**TABEL : REALISASI ANGGARAN DIPA 01 PENGADILAN NEGERI SINABANG TAHUN
2019**

No	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa Dana	
			Rp.	%	Rp.	%
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	2.606.618.000,00	2.526.537.773,00	96,93	80.080.227,00	3,07
	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	1.679.995.000,00	1.634.535.773,00	97,29	45.459.227,00	2,71
	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	926.623.000,00	892.002.000,00	96,26	34.621.000,00	3,74
	BELANJA MODAL	25.500.000,00	25.398.000,00	99,60	102.000,00	0,40

**TABEL : REALISASI ANGGARAN DIPA 03 PENGADILAN NEGERI SINABANG TAHUN
2019**

NO	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa Dana	
			Rp.	%	Rp.	%
	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	38.100.000,00	37.382.000,00	98,12	718.000,00	1,88
	Pos Bantuan Hukum	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	14.100.000,00	13.382.000,00	94,91	718.000,00	5,09

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA.

1. Sarana dan Prasarana Gedung

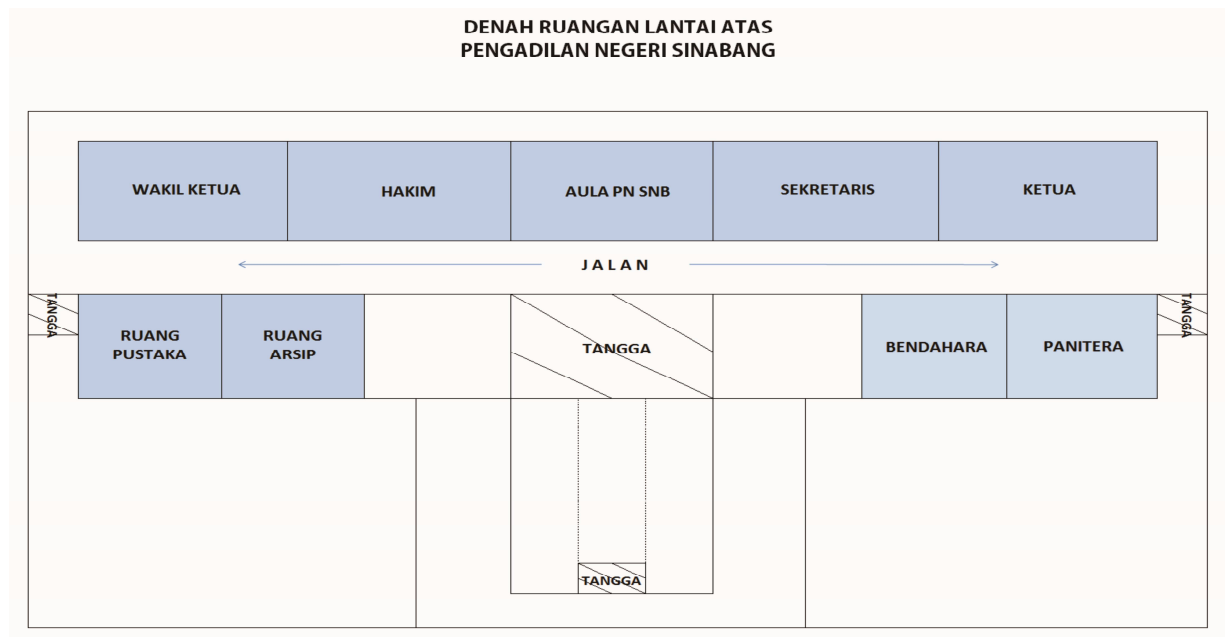
Gedung kantor Pengadilan Negeri Sinabang dibangun di atas tanah seluas 7,322 m². Pada halaman depan gedung kantor terdapat pos jaga seluas 6 m² dan tempat parkir kendaraan roda 4 (empat).

Gedung kantor Pengadilan Negeri Sinabang terdiri dari 2 (dua) lantai, dengan penataan ruangan-ruangan sebagai berikut :

a. Lantai 2

1. Ruang Kerja Ketua, yang mana ruang kerja Ketua juga untuk menerima tamu dan dilengkapi dengan toilet dan AC;
2. Ruang Kerja Wakil Ketua, yang mana ruang kerja Wakil Ketua juga untuk menerima tamu dan dilengkapi dengan toilet dan AC;
3. Ruang Kerja Hakim, yang mana ruang kerja Hakim dilengkapi dengan toilet dan AC;
4. Ruang Mediasi terletak berdekatan dengan tangga masuk ke lantai II yang mana mempermudah untuk melakukan mediasi;
5. Ruang Sekretaris bersebelahan dengan Ruang Ketua.

6. Ruang Panitera berhadapan dengan ruang Ketua yang juga untuk menerima tamu dilengkapi dengan toilet dan AC;
7. Ruang Bendahara, berdekatan dengan ruang Panitera yang dilengkapi dengan AC;
8. Ruang Perpustakaan, berhadapan dengan ruang Wakil Ketua;
9. Ruang Arsip yang terdiri dari Ruang Arsip Perkara Pidana dan Ruang Arsip Perkara Perdata.
10. Ruang Perpustakaan.



b. Lantai 1

1. Ruang Sidang Cakra, selain untuk tempat bersidang juga digunakan sebagai tempat rapat Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Sinabang;
2. Ruang Kepaniteraan, difungsikan Staf Panmud Pidana, Staf Panmud Perdata, dan Staf Panmud Hukum;
3. Ruang Wakil Panitera, berdekatan dengan ruang Staf Kepaniteraan yang juga untuk menerima tamu yang dilengkapi dengan AC;
4. Ruang Panitera Muda Perdata;
5. Ruang Panitera Muda Pidana;
6. Ruang Panitera Hukum;
7. Ruang IT;

8. Ruang Kesekretariatan, difungsikan sebagai Staf Umum dan Keuangan, Ruang Staf Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, dan Staf Perencanaan Teknologi informasi dan Pelaporan;
9. Ruang Kepala Subbag Umum dan Keuangan;
10. Ruang Kepala Subbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
11. Ruang Kepala Subbag Perencanaan Teknologi informasi dan Pelaporan.
12. Kamar Mandi Staf terdiri dari kamar mandi perempuan dan laki-laki yang terletak di sisi kiri dan kanan.
13. Ruang Jaksa;
14. Ruang Pos Pelayanan Hukum;
15. Ruang Dharma Yukti Karini;
16. Kamar Mandi Pengunjung Pria dan wanita yang terletak bagian di sisi kiri dan kanan.
17. Ruang Tahanan Pria dan Ruang Tahanan Wanita;
18. Panitera Pengganti dan Jurusita
19. Ruang Sidang Anak;
20. Ruang Tahanan Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan.
21. Ruang Mushallah.
22. Ruang Tunggu pengunjung sidang.

Tabel : Aset Tanah dan Bangunan.

No	Nama Aset	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah	7	Aset tanah telah bersertifikat seluruhnya.
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Digunakan untuk gedung kantor
3.	Bangunan Rumah Dinas Tipe C	13	Digunakan untuk rumah dinas hakim dan pegawai

Hal-hal yang dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Sinabang antara lain adanya sarana dan prasarana fasilitas yang menunjang. Dalam hal ini sarana dan prasarana fasilitas gedung yang ada di Pengadilan Negeri Sinabang adalah :

Tabel : Sarana dan Prasarana Gedung.

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Umum	1	
7	Ruang Sidang Anak	1	
8	Ruang Panmud	3	
9	Ruang Staf Kepaniteraan	1	
10	Ruang Kasubbag	3	
11	Ruang Staf Kesekretariatan	1	
12	Ruang IT	1	
13	Ruang Jaksa	1	
14	Ruang Mediasi/Diversi	1	
15	Ruang Tahanan	4	
16	Ruang Laktasi	1	
17	Ruang Posbakum	1	
18	Ruang Rapat	1	
19	Ruang Arsip	1	
20	Ruang Pustaka	1	
21	Ruang Jurusita	1	
22	Ruang Panitera Pengganti	1	
Sarana/prasarana Fasilitas perkantoran kantor			
1	Computer	12	Baik
2	Laptop	9	Baik
3	Printer	15	Baik
4	Server	2	Baik
5	Reuter	1	Baik
6	Ac	12	Baik

Tabel : Kendaraan Dinas.

N o	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
I	Jenis kendaran roda 4	4				
1	Toyota Innova (Luxury)	2014	1	-	-	DIPA Satker
2	Toyota Innova (seri E)	2006	-	1	-	DIPA Satker
3	New Avanza	2012	1	-	-	DIPA Satker
4	Daihatsu Taruna	2006	-	-	1	Hibah Pemda Kab. Simeulue
II	Jenis kendaraan Roda 2	1	-	1	-	
1	Honda Astrea Grand	2006	-	-	1	
2	Honda GLP Max	1996	-	-	1	
3	Honda MCB	1996	-	-	1	
4	Honda Supra x	2005	-	1	-	
5	Honda Supra	2006	1	-	-	
7	Honda Blade	2013	1	-	-	
8	Honda Blade	2015	1	-	-	

Tabel : Rumah Dinas Pengadilan Negeri Sinabang.

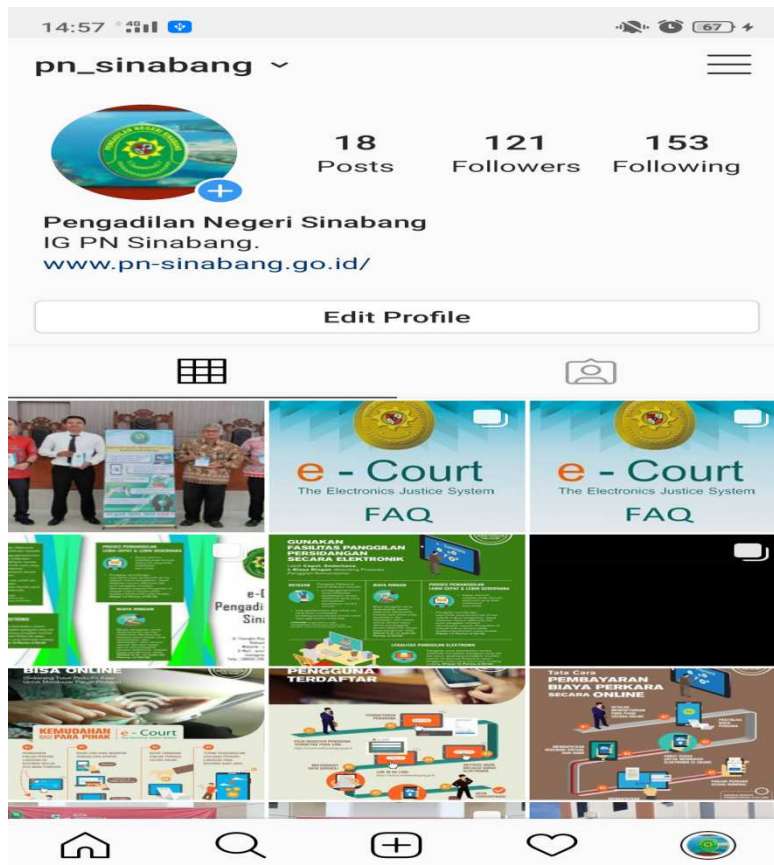
No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
I	Rumah Dinas	13				
1	Rumah Dinas Ketua	1	-	1	-	
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	-	1	-	
3	Rumah Dinas Hakim	9	-	9	-	
4	Rumah Dinas Panitera	1	-	1	-	
5	Rumah Dinas Sekretaris	1	-	1	-	

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

- Implementasi E-court di Lingkungan Peradilan Umum.

Guna menunjang implementasi E-court Pengadilan Negeri Sinabang telah menyiapkan sarana dan prasarana berupa meja Layanan Ecourt berupa Pojok Layanan Ecourt.





Gambar : Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Ecourt.



Gambar : Website Sebagai Sarana Informasi Ecourt.

dan memberikan informasi ecourt melalui media sosial dan website Pengadilan Negeri Sinabang melakukan sosialisasi internal ecourt, kegiatan layanan ecourt tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang tentang Pengelolaan Meja Informasi dan Pojok Ecourt. Berikut disampaikan implementasi penerapan ecourt di Pengadilan Negeri Sinabang.

Tabel : Jumlah Perkara Masuk yang didaftarkan Melalui E-court tahun 2019.

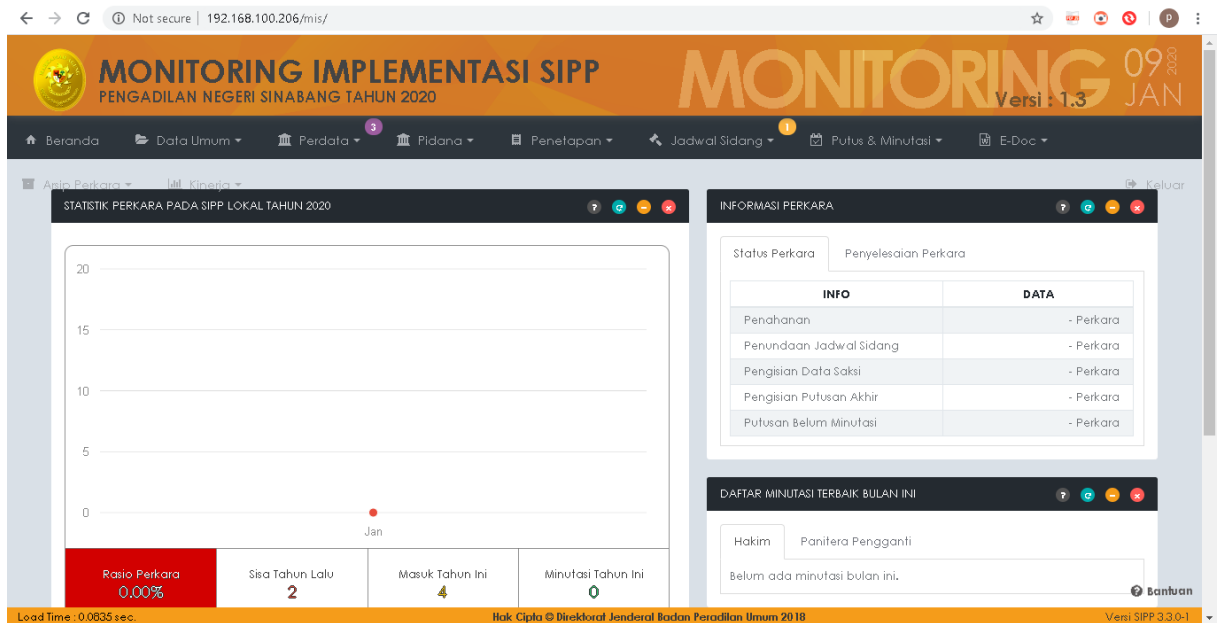
No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Masuk yang didaftarkan melalui E-Court
1	Gugatan	-
2	Bantahan	-
3	Gugatan sederhana	-
4	Permohonan	5 Perkara

- Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum.

Dalam rangka mendukung administrasi perkara berbasis elektronik khususnya pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pembenahan dan peningkatan teknologi informasi merupakan salah satu prioritas demi terwujudnya keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi Pengadilan yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	2/Pdt.P/2020/PN Snb	08 Jan 2020	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	Pemohon: Nilam Wahyu Ningsih	Sidang pertama	1 Hari	[detail]
2	1/Pdt.P/2020/PN Snb	06 Jan 2020	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	Pemohon: Zulkarnain	Sidang pertama	3 Hari	[detail]
3	1/Pid.B/2020/PN Snb	03 Jan 2020	Penipuan	Penuntut Umum: 1.Solihin, S.H 2.Heri Ikbal, S.H Terdakwa: Noni Afrita Binti Minwan B	Persidangan	6 Hari	[detail]
4	2/Pid.B/2020/PN Snb	03 Jan 2020	Penipuan	Penuntut Umum: 1.Heri Ikbal, S.H 2.Abdul Basir, S.H Terdakwa: Husaini Bin Alm. Aderan	Persidangan	6 Hari	[detail]
5	26/Pdt.P/2019/PN Snb	12 Dec 2019	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	Pemohon: Hasianto	Minutasi	5 Hari	[detail]
6	27/Pdt.P/2019/PN Snb	10 Dec 2019	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	Pemohon:	Minutasi	7 Hari	[detail]

Gambar : Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara(SIPP).



Gambar : Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP

Pada tahun 2019 bandwidth Internet yang semula 50 Mbps ditingkatkan menjadi 70 Mbps internet Dedicated demi meningkatkan konektivitas akses terhadap aplikasi / sistem berbasis elektronik yang ada di Mahkamah Agung RI termasuk SIPP. Keadaan perangkat teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Sinabang adalah sebagai berikut :

Tabel : Keadaan Teknologi Informasi dan Pendukungnya Tahun 2019

No	Satuan Kerja	Keadaan Teknologi Informasi dan pendukungnya									
		Internet	Server	PC	Laptop	Printer	Access Point	Router	Switch Hub	Layar Informasi	Kiosk
1	PN Sinabang	70 Mbps Internet Dedicated	2	12	9	15	8	1	1	1	1

Data tersebut merupakan perangkat IT yang dalam keadaan kondisi baik.



Gambar : Server Penunjang SIPP.

Bab. V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- Akreditasi Penjaminan Mutu.

Akreditasi Penjaminan Mutu bertujuan mewujudkan performa / kinerja Peradilan Indonesia yang unggul / prima (Indonesian Court Performance Excellent – ICPE).

Pengadilan Negeri Sinabang pada tahun 2018 telah terakreditasi dengan nilai A “*excellent*”



Gambar : Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu.

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Adapun Tujuan Penerapan PTSP adalah sebagai berikut:

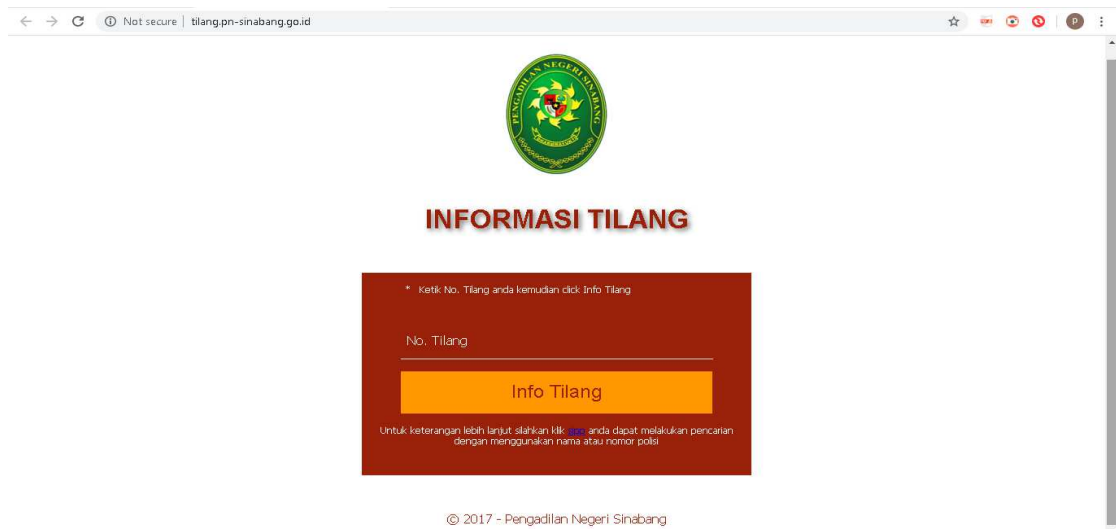
1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
2. Mempersingkat proses pelayanan.
3. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.
4. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.



Gambar : Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Sinabang.

- Inovasi Pelayanan Publik.

Guna memberikan Pelayanan Publik yang Prima pengadilan Negeri Sinabang melakukan inovasi berupa Aplikasi Denda Tilang Berbasis Web. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah para pelanggar lalu lintas mengetahui besaran denda tilang yang telah diputus oleh Pengadilan tanpa harus datang ke Pengadilan para pelanggar lalu lintas cukup mengakses alamat <http://tilang.pn-sinabang.go.id/> dari gadget yang terhubung dengan koneksi internet.



Gambar : Aplikasi Informasi Tilang.

Aplikasi ini menindaklanjuti Tata cara sidang dan pembayaran denda tilang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Dalam Pasal 4 dijelaskan “Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar”.

BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal.

Pengawasan yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pengadilan Negeri Sinabang sendiri pengawasan telah dilakukan secara rutin dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinabang No W1.U9/156/KP.04.11/2/2019 Tentang Hakim Pengawas.

Pengawasan pada Pengadilan Negeri Sinabang dilakukan secara internal untuk kemudian dilakukan evaluasi.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.: KMA/ 080 / SK / VIII / 2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud dengan Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/080 / SK / VIII / 2006 tersebut, selanjutnya telah diuraikan secara lebih jelas mengenai maksud, tujuan dan fungsi pengawasan itu, sebagai berikut :

Maksud Pengawasan :

- a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Untuk menilai kinerja.

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau Pimpinan Pengadilan

untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Fungsi Pengawasan :

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya perkara yang murah.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/080 / SK / VIII / 2006, pada dasarnya Pengawasan Internal itu ada 2 (dua) jenis, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

- Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Dilingkungan peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, termasuk Pengadilan Negeri Sinabang, yang berwenang dan bertanggung-jawab dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Melekat adalah :

1. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Seluruh Pejabat Kepaniteraan.
3. Seluruh Pejabat Struktural.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Pimpinan Pengadilan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Tugas Pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pada Pengadilan Negeri Sinabang, Nomor W1.U9/101/KP.04.11/1/2018 Tentang Hakim Pengawas, Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Hakim Pengawas
2.	RAHMAWAN, S.H	HAKIM	1. Kepaniteraan muda hukum 2. Kepaniteraan Muda Pidana; 3. Kepaniteraan Muda Perdata. 4. Hakim pengawas dan pengamat
3.	RESTU IKHLAS, S.H., M.H.	HAKIM	1. Subbag Umum dan Keuangan; 2. Subbag Kepegawaian dan Ortala; 3. Subbag PTIP.

Hakim-hakim Pengawas Bidang tersebut secara periodik selama 4 (empat bulan sekali) menyampaikan laporan hasil pengawasan bidang masing-masing kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

B. EVALUASI

Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi. Hasil dari kegiatan evaluasi adalah bersifat kualitatif.

Ketua Pengadilan Negeri Sinabang secara rutin melaksanakan Apel setiap hari Senin Pagi dan hari Jum'at Sore serta melakukan Evaluasi kinerja aparatur Pengadilan Negeri Sinabang melalui Rapat Bulanan yang selalu dilaksanakan tiap bulannya. Rapat bulanan selain untuk Evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah untuk membahas mengenai segala hambatan dalam pelaksanaan tugas serta juga bermanfaat untuk silaturahmi untuk membangun kebersamaan antar keluarga besar Pengadilan Negeri Sinabang.

Evaluasi dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Sinabang dengan sistem Mengadakan rapat bulanan yang dilaksanakan setiap Bulan minggu ke-1, yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinabang.

BAB. VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Sinabang telah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan pencari keadilan dengan memberikan layanan berupa kemudahan memperoleh informasi mengenai Pengadilan Negeri Sinabang melalui Website resmi Pengadilan Negeri Sinabang www.pn-sinabang.go.id, kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai jadwal sidang, proses perkara melalui aplikasi penelusuran perkara dengan mengakses www.sipp.pn-sinabang.go.id, direktori putusan Pengadilan Negeri Sinabang, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta menyediakan pelayanan POSBAKUM bagi masyarakat.

B. REKOMENDASI

Pelayanan Pengadilan Negeri Sinabang terhambat oleh 3 (tiga) hal yaitu :

1. Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil;
2. Kurangnya jaminan keamanan Kantor Pengadilan Negeri Sinabang, oleh karena belum adanya pagar sisi kiri, sisi kanan gedung kantor serta bagian belakang gedung kantor.

Untuk mengatasi hambatan tersebut di harapkan untuk segera adanya :

1. Penambahan jumlah pegawai, disertai system promosi dan mutasi berkala agar terjadi penyegaran pegawai.
2. Penambahan anggaran belanja modal peningkatan sarana dan prasarana.

Demikian Laporan ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**LAMPIRAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2019
PENGADILAN NEGERI SINABANG**

LAMPIRAN I
DAFTAR REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019
DIPA 01

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN DESEMBER TAHUN 2019

SATUAN KERJA : (098586) PENGADILAN NEGERI SINABANG
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO./TGL DIPA : DIPA-005.01.2.098586/2019 tgl. 05-12-2018

No	Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi s.d bulan lalu		Realisasi bulan ini		Realisasi s.d bulan ini		Sisa dana s.d bulan ini	
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	2.606.618.000,00	2.331.691.775,00	89,45	220.243.998,00	8,45	2.551.935.773,00	97,90	80.182.227,00	3,08
	005.01.01.1066.994.001. A	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	1.679.995.000,00	1.497.944.775,00	89,16	136.590.998,00	8,13	1.634.535.773,00	97,29	45.459.227,00	2,71
	005.01.01.1066.994.001. A.511111	Beban Gaji Pokok PNS	716.765.000,00	655.808.160,00	91,50	57.059.820,00	7,96	712.867.980,00	99,46	3.897.020,00	0,54
	005.01.01.1066.994.001. A.511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	18.000,00	11.846,00	65,81	1.095,00	6,08	12.941,00	71,89	5.059,00	28,11
	005.01.01.1066.994.001. A.511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	49.564.000,00	45.689.600,00	92,18	3.847.650,00	7,76	49.537.250,00	99,95	26.750,00	0,05
	005.01.01.1066.994.001. A.511122	Beban Tunj. Anak PNS	9.794.000,00	9.018.390,00	92,08	640.376,00	6,54	9.658.766,00	98,62	135.234,00	1,38
	005.01.01.1066.994.001. A.511123	Beban Tunj. Struktural PNS	21.850.000,00	20.250.000,00	92,68	1.520.000,00	6,96	21.770.000,00	99,63	80.000,00	0,37
	005.01.01.1066.994.001. A.511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	553.485.000,00	514.485.000,00	92,95	38.315.000,00	6,92	552.800.000,00	99,88	685.000,00	0,12
	005.01.01.1066.994.001. A.511125	Beban Tunj. PPh PNS	67.145.000,00	63.568.379,00	94,67	3.182.837,00	4,74	66.751.216,00	99,41	393.784,00	0,59
	005.01.01.1066.994.001. A.511126	Beban Tunj. Beras PNS	33.551.000,00	30.416.400,00	90,66	2.969.220,00	8,85	33.385.620,00	99,51	165.380,00	0,49
	005.01.01.1066.994.001. A.511129	Beban Uang Makan PNS	160.558.000,00	97.387.000,00	60,66	23.115.000,00	14,40	120.502.000,00	75,05	40.056.000,00	24,95
	005.01.01.1066.994.001. A.511151	Beban Tunjangan Umum PNS	17.315.000,00	15.655.000,00	90,41	1.645.000,00	9,50	17.300.000,00	99,91	15.000,00	0,09
	005.01.01.1066.994.001. A.511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	49.950.000,00	45.655.000,00	91,40	4.295.000,00	8,60	49.950.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.01.1066.994.002	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	926.623.000,00	808.349.000,00	87,24	83.653.000,00	9,03	892.002.000,00	96,26	34.621.000,00	3,74
	005.01.01.1066.994.002. A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	334.208.000,00	308.678.000,00	92,36	25.515.000,00	7,63	334.193.000,00	100,00	15.000,00	0,00
	005.01.01.1066.994.002. A.521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Honorar)	298.200.000,00	275.100.000,00	92,25	23.100.000,00	7,75	298.200.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.01.1066.994.002. A.521119	Biaya keperluan perkantoran lainnya	1.754.000,00	1.745.000,00	99,49	0,00	0,00	1.745.000,00	99,49	9.000,00	0,51
	005.01.01.1066.994.002. A.521811	Biaya keperluan sehari-hari perkantoran (ATK)	34.254.000,00	31.833.000,00	92,93	2.415.000,00	7,05	34.248.000,00	99,98	6.000,00	0,02
	005.01.01.1066.994.002. B	LANGGANAN DAYA DAN JASA	180.928.000,00	130.863.000,00	72,33	37.738.000,00	20,86	168.601.000,00	93,19	12.327.000,00	6,81
	005.01.01.1066.994.002. B.521111	Langganan Internet (BA, BUN)	101.416.000,00	67.626.000,00	66,68	26.819.000,00	26,44	94.445.000,00	93,13	6.971.000,00	6,87
	005.01.01.1066.994.002. B.522114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18.000.000,00	17.309.000,00	96,16	690.000,00	3,83	17.999.000,00	99,99	1.000,00	0,01
	005.01.01.1066.994.002. B.522111	Beban Langganan Listrik	49.680.000,00	39.504.000,00	79,52	10.093.000,00	20,32	49.597.000,00	99,83	83.000,00	0,17
	005.01.01.1066.994.002. B.522112	Beban Langganan Telepon	7.200.000,00	1.824.000,00	25,33	136.000,00	1,89	1.960.000,00	27,22	5.240.000,00	72,78
	005.01.01.1066.994.002. B.522113	Beban Langganan Air	4.632.000,00	4.600.000,00	99,31	0,00	0,00	4.600.000,00	99,31	32.000,00	0,69
	005.01.01.1066.994.002. C	PEMELIHARAAN KANTOR	271.199.000,00	244.463.000,00	90,14	11.008.000,00	4,06	255.471.000,00	94,20	15.728.000,00	5,80

Hal 2 / 2

Revisi: 005.01.2.098586/2019 tgl. 05-12-2018

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN DESEMBER TAHUN 2019**

SATUAN KERJA : (098586) PENGADILAN NEGERI SINABANG
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO./TGL DIPA : DIPA-005.01.2.098586/2019 tgl. 05-12-2018

No	Kode Satker, Program, Keg. Output, Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi s.d bulan lalu		Realisasi bulan ini		Realisasi s.d bulan ini		Sisa dana s.d bulan ini	
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2.606.618.000,00	2.331.691.775,00	89,45	220.243.998,00	8,45	2.551.935.773,00	97,90	80.182.227,00	3,08
	005.01.01.1066.994.002. C.521811	Bahan bakar Genset	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.01.1066.994.002. C.523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KANTOR)	88.150.000,00	87.570.000,00	99,34	580.000,00	0,66	88.150.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.01.1066.994.002. C.523119	Beban Pemeliharaan rumah dinas	25.545.000,00	25.420.000,00	99,51	125.000,00	0,49	25.545.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.01.1066.994.002. C.523121	Beban Pemeliharaan peralatan dan mesin	155.504.000,00	129.473.000,00	83,26	10.303.000,00	6,63	139.776.000,00	89,89	15.728.000,00	10,11
	005.01.01.1066.994.002. D	PEMBAYARAN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	54.888.000,00	48.542.000,00	88,44	6.346.000,00	11,56	54.888.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.01.1066.994.002. D.521115	Beban honor operasional satuan kerja	38.520.000,00	32.174.000,00	83,53	6.346.000,00	16,47	38.520.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.01.1066.994.002. H.521119	Beban Pakain dinas pegawai dan honorer	16.368.000,00	16.368.000,00	100,00	0,00	0,00	16.368.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.01.1066.007.011. E	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	0,00	0,00	1.400.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.01.1066.007.011. E.521211	Beban Bahan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.01.1066.007.011. E.522191	Beban Jasa Lainnya	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.01.1066.007.011. F	RAPAT KOORDINASI INTERNAL	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	0,00	0,00	2.400.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.01.1066.007.011. F.521211	Belanja Bahan	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	0,00	0,00	2.400.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.01.1066.007.011. G	KONSULTASI KETINGKAT BANDING	81.600.000,00	72.003.000,00	88,24	3.046.000,00	3,73	75.049.000,00	91,97	6.551.000,00	8,03
	005.01.01.1066.007.011. G.524111	Beban perjalanan biasa	81.600.000,00	72.003.000,00	88,24	3.046.000,00	3,73	75.049.000,00	91,97	6.551.000,00	8,03
	005.01.01.1071.951	BELANJA MODAL	25.500.000,00	25.398.000,00	99,60	0,00	0,00	25.398.000,00	99,60	102.000,00	0,40
	005.01.01.1071.951.052	Belanja modal Peralatan dan Mesin (Laptop)	25.500.000,00	25.398.000,00	99,60	0,00	0,00	25.398.000,00	99,60	102.000,00	0,40

DIPA 03

**LAPORAN REALISASI PENEYERAPAN ANGGARAN DIPASATUAN KERJA
BULAN DESEMBER TAHUN 2019**

SATUAN KERJA : (099186) PENGADILAN NEGERI SINABANG
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Badan Peradilan Umum
NO./TGL DIPA : DIPA-005.03.2.099186/2019 tgl. 05-12-2018

NO	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi s.d bulan lalu		Realisasi bulan ini		Realisasi s.d bulan ini		Sisa dana s.d bulan ini	
			Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
A	07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	38.100.000,00	31.282.000,00	82,10	6.100.000,00	16,01	37.382.000,00	98,12	718.000,00	1,88
1	1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	38.100.000,00	31.282.000,00	82,10	6.100.000,00	16,01	37.382.000,00	98,12	718.000,00	1,88
	051 Pos Bantuan Hukum	24.000.000,00	18.800.000,00	78,33	5.200.000,00	21,67	24.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	522131 Beban Jasa Konsultan	24.000.000,00	18.800.000,00	78,33	5.200.000,00	21,67	24.000.000,00	100,00	0,00	0,00
2	1049.005 Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	14.100.000,00	12.482.000,00	88,52	900.000,00	6,38	13.382.000,00	94,91	718.000,00	5,09
	051 PENDAFTARAN BERKAS PERKARA	4.500.000,00	4.055.000,00	90,11	40.000,00	0,89	4.095.000,00	91,00	405.000,00	9,00
	521211 Belanja Bahan	600.000,00	200.000,00	33,33	0,00	0,00	200.000,00	33,33	400.000,00	66,67
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.900.000,00	3.855.000,00	98,85	40.000,00	1,03	3.895.000,00	99,87	5.000,00	0,13
	052 PENETAPAN HARI SIDANG	1.500.000,00	1.450.000,00	96,67	50.000,00	3,33	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00
	524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.500.000,00	1.450.000,00	96,67	50.000,00	3,33	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00
	053 PEMERIKSAAN DISIDANG PENGADILAN	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	0,00	0,00	1.300.000,00	100,00	0,00	0,00
	521211 Belanja Bahan	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00	0,00	0,00	1.150.000,00	100,00	0,00	0,00
	524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00
	054 MINUTASI/UPAYA HUKUM	2.030.000,00	1.680.000,00	82,76	350.000,00	17,24	2.030.000,00	100,00	0,00	0,00
	521211 Belanja Bahan	2.030.000,00	1.680.000,00	82,76	350.000,00	17,24	2.030.000,00	100,00	0,00	0,00

**LAPORAN REALISASI PENERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN DESEMBER TAHUN 2019**

SATUAN KERJA : (099186) PENGADILAN NEGERI SINABANG
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Badan Peradilan Umum
NO./TGL DIPA : DIPA-005.03.2.099186/2019 tgl. 05-12-2018

NO	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi s.d bulan lalu		Realisasi bulan ini		Realisasi s.d bulan ini		Sisa dana s.d bulan ini	
			Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
	055 PENGIRIMAN PETIKAN/ SALINAN PUTUSAN KEPADA JPU DAN TERDAKWA	1.560.000,00	1.350.000,00	86,54	110.000,00	7,05	1.460.000,00	93,59	100.000,00	6,41
	521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	210.000,00	0,00	0,00	110.000,00	52,38	110.000,00	52,38	100.000,00	47,62
	524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	0,00	0,00	1.350.000,00	100,00	0,00	0,00
	056 PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN	1.510.000,00	1.300.000,00	86,09	0,00	0,00	1.300.000,00	86,09	210.000,00	13,91
	521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	100,00
	524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	0,00	0,00	1.300.000,00	100,00	0,00	0,00
	057 PENANGANAN PERKARA BANDING DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA	850.000,00	500.000,00	58,82	350.000,00	41,18	850.000,00	100,00	0,00	0,00
	521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00
	524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00
	058 PENANGANAN PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA	850.000,00	847.000,00	99,65	0,00	0,00	847.000,00	99,65	3.000,00	0,35
	521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	350.000,00	347.000,00	99,14	0,00	0,00	347.000,00	99,14	3.000,00	0,86
	524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00

LAMPIRAN II
DAFTAR ASET SIMAK BMN

MAURAHMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHEKAMAH SYARIAH AGUNG

LAPORAN BARANG KUASA PENGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KENDOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 005.01.05.008586 PENGADILAN NEGRI SINARANG

Tanggal : 09-01-2020
Halaman : 1
Kode Lap : LK035SKT

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		BERTAMBAH		KURANG		BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1B111	TANAH		11,603	8.891.770,00	0	0	0	0	11,603	8.891.770,00		
9.01.01.01.002	Tanah Berstatus Rumah Negara Cakupan I	ML	4,281	2.771.530,00	0	0	0	0	4,281	2.771.530,00		
7.01.01.02.001	Tanah Berstatus Rumah Negara Cakupan I	ML	1,522	6.128.240,00	0	0	0	0	1,522	6.128.240,00		
1B111	PERALATAN DAN MESIN		242	2.779.779.780	13	196.300.190	0	0	235	2.779.779.780		
3.02.01.01.003	Simpan Mekanik	Unit	2	26.430.000	0	0	0	0	2	26.430.000		
2.02.01.02.005	Mobil Baru (Pemeriksaan 120000 Kilojam)	Unit	1	480.000,000	0	0	0	0	1	480.000,000		
3.02.01.04.001	Surplus Motor	Unit	4	61.996,479	0	0	0	0	4	61.996,479		
3.01.01.04.004	Lemari Bersempit	Buah	5	22.981.002	0	0	0	0	5	22.981.002		
3.02.01.01.001	Lemari Bersempit	Buah	15	31.403.002	0	0	0	0	15	31.403.002		
3.02.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	7	23.850.000	0	0	0	0	7	23.850.000		
1.03.01.04.003	Rak Besi	Rak	4	20.970.000	0	0	0	0	4	20.970.000		
1.03.01.04.005	Prinuk Lemari Besi	Buah	5	16.290.002	0	0	0	0	5	16.290.002		
3.06.01.04.007	Shower	Buah	2	10.744.000	0	0	0	0	2	10.744.000		
3.09.01.04.004	Car Boy	Buah	3	3.820.000	0	0	0	0	3	3.820.000		
1.05.01.05.001	Telang Pemaman Aji	Buah	4	4.880.000	0	0	0	0	4	4.880.000		
3.02.01.05.007	CCTV - Camera Control Televisi System	Buah	1	1.300.000	0	0	0	0	1	1.300.000		
1.03.01.05.008	Prinuk Visual/Papan Hitam	Buah	6	1.680.000	0	0	0	0	6	1.680.000		
1.05.01.05.017	Media Akrilik	Buah	1	1.200.000	0	0	0	0	1	1.200.000		
3.06.01.05.044	Media Lembaran	Buah	1	8.000.000	0	0	0	0	1	8.000.000		
3.06.01.05.048	LCD Proyektor/Beamer	Buah	1	880.000	0	0	0	0	1	880.000		
1.03.01.05.051	Papan Pengumuman	Buah	1	770.000	0	0	0	0	1	770.000		
3.02.01.05.999	Perbaikan Kantor Lainnya	Buah	1	33.190.000	0	0	0	0	1	33.190.000		
3.05.02.01.002	Mega Kaps Sutra	Buah	36		0	0	0	0	36			

LAPORAN BARANG KLASA PINGGIRAN TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 002.01.06.098586 PENGADILAN NEGERI SIBABANG

Tanggal : 08-01-2020
Halaman : 2
Kode Lap : 188058KT

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER		BERTAMBAH				SALDO PER	
			1 JANUARI 2019		31 DESEMBER 2019					
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
3.05.02.01.003	Koran Baw/Metal	Buah	9	37.500,000	0	0	0	0	9	37.500,000
3.05.02.01.004	Koran Kayu	Buah	15	35.100,000	0	0	0	0	15	35.100,000
3.05.02.01.005	Sisa	Buah	1	34.150,000	0	0	0	0	1	34.150,000
3.05.02.01.006	Mega Kapal	Buah	6	25.200,000	0	0	0	0	6	25.200,000
3.05.02.01.010	Tampan Tula Basi	Buah	1	1.500,000	0	0	0	0	1	1.500,000
3.05.02.01.014	Mega Responansi	Buah	2	47.990,000	0	0	0	0	2	47.990,000
3.05.02.01.020	Batu Mabrani	Buah	1	100,000	0	0	0	0	1	100,000
3.05.02.01.024	A.C. Spide	Buat	15	82.800,000	0	0	0	0	15	82.800,000
3.05.02.01.024	Kipas Angin	Buat	2	1.200,000	0	0	0	0	2	1.200,000
3.05.02.01.025	Sentral Basyan	Buah	2	12.900,000	0	0	0	0	2	12.900,000
3.05.02.01.026	Lanting Candi Pangsia	Buah	1	1.584,570	0	0	0	0	1	1.584,570
3.05.02.01.028	Tiang Pindan	Buah	3	1.420,000	0	0	0	0	3	1.420,000
3.05.02.01.030	Amang Isatani	Buah	1	4.453,000	0	0	0	0	1	4.453,000
3.05.02.01.032	Seckhu Koro	Buah	4	19.250,000	0	0	0	0	4	19.250,000
3.05.02.01.036	Kasugawa Onitas MTC	Buah	2	1.800,000	0	0	0	0	2	1.800,000
3.05.02.01.040	Comanogable Pance Sappi (UPS)	Buah	4	24.296,900	0	0	0	0	4	24.296,900
3.05.02.01.041	Digital LCD Kaming Test	Buah	1	9.000,000	0	0	0	0	1	9.000,000
3.05.02.01.042	LCD Monitor	Buah	1	6.700,000	0	0	0	0	1	6.700,000
3.05.02.01.043	Printer	Buah	1	1.341,970	0	0	0	0	1	1.341,970
3.05.02.01.044	Carpet	Buah	1	288.750,000	0	0	0	0	1	288.750,000
3.05.02.01.045	Kasir Daring	Buah	1	3.300,000	0	0	0	0	1	3.300,000
3.05.02.01.046	Kasir Zine	Buah	34	72.140,000	0	0	0	0	34	72.140,000
3.05.02.01.047	Kasir Jantung Jantung	Buah	0	0	0	17.840,000	0	0	0	17.840,000

LAPORAN BARANG KULASA PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KECOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA LAKRIP : 005.01.06.098586 PENGADILAN NEGERI SIBARANG

Tanggal : 09-01-2020
Harian : 4
Kode Lap : L803586T

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER		BERTAMBAH				BERKURANG		SALDO PER	
			1 JANUARI 2019								31 DESEMBER 2019	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
3.05.01.06.003	Lemari Besi Metal	Buah	3	6.368,750	0	0	0	0	0	0	3	6.368,750
3.05.01.06.002	Lemari Kayu	Buah	2	5.100,000	0	0	0	0	0	0	2	5.100,000
3.05.01.06.004	Rak Kayu	Buah	7	7.295,100	0	0	0	0	0	0	7	7.295,100
3.05.01.06.005	Taliq Choker Besi	Buah	5	2.627,500	0	0	0	0	0	0	5	2.627,500
3.05.01.06.006	Baper Visual Papan Mera	Buah	4	1.990,000	0	0	0	0	0	0	4	1.990,000
3.05.01.06.017	Meja Absesid	Buah	1	50.000,000	0	0	0	0	0	0	1	50.000,000
3.05.01.06.012	Meja Kaca Kayu	Buah	31	50.750,000	0	0	0	0	0	0	31	50.750,000
3.05.01.06.003	Kursi Besi Metal	Buah	100	149.350,000	0	0	0	0	0	0	100	149.350,000
3.05.01.06.005	Stole	Buah	11	43.650,000	0	0	0	0	0	0	11	43.650,000
3.05.01.06.017	Rapihan Papan Kayu	Buah	18	9.000,000	0	0	0	0	0	0	18	9.000,000
3.05.01.06.004	Meja Kayu	Buah	1	16.000,000	0	0	0	0	0	0	1	16.000,000
3.05.01.06.016	Tongkat Teras Besi	Buah	12	41.000,000	0	0	0	0	0	0	12	41.000,000
3.05.01.06.019	Meja Mekan Kayu	Buah	0	11.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.05.01.06.023	Pasir Aspal (Pembatas Aspal)	Buah	1	1.500,000	0	0	0	0	0	0	1	1.500,000
3.05.02.02.001	Jam Mekan	Buah	10	750,000	0	0	0	0	0	0	10	750,000
3.05.02.02.004	A.C. Split	Buah	5	51.213,000	0	0	0	0	0	0	5	51.213,000
3.05.02.04.006	Kipas Angin	Buah	13	7.135,600	0	0	0	0	0	0	13	7.135,600
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	1	5.217,450	0	0	0	0	0	0	1	5.217,450
3.05.02.06.003	Sound System	Buah	3	21.534,625	0	0	0	0	0	0	3	21.534,625
3.05.02.06.004	Peta Slang	Buah	1	250,000	0	0	0	0	0	0	1	250,000
3.05.02.06.005	Garuk Kayu	Buah	20	4.000,000	0	0	0	0	0	0	20	4.000,000
3.05.02.06.999	Ada Benda, Tetapi Tidak Ada (Benda Ilegal)	Buah	1	2.550,000	0	0	0	0	0	0	1	2.550,000

LAPORAN BARANG KULASA PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KECAMPAK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UATPD : 005.01.06.008586 PENGADILAN NEGERI SINARANG

Tanggal : 00-01-2020
Harian : 4
Kode Lap : L80058BT

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JANUARI 2019		BERTAMBAH		BERKURANG		31 DESEMBER 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.05.01.06.003	Lemari besi/wood	buah	3	6.368.750	0	0	0	0	3	6.368.750
3.05.01.06.002	Lemari kayu	buah	2	5.000.000	0	0	0	0	2	5.000.000
3.05.01.06.004	Rak kayu	buah	7	7.255.000	0	0	0	0	7	7.255.000
3.05.01.06.005	Tempat tidur besi	buah	5	2.627.500	0	0	0	0	5	2.627.500
3.05.01.06.006	Tempat tidur kayu	buah	4	1.290.000	0	0	0	0	4	1.290.000
3.05.01.06.007	Meja makan	buah	3	80.000.000	0	0	0	0	3	80.000.000
3.05.01.06.008	Meja kerja kayu	buah	31	70.750.000	0	0	0	0	31	70.750.000
3.05.01.06.009	Kursi besi/wood	buah	100	149.350.000	0	0	0	0	100	149.350.000
3.05.01.06.010	Sofa	buah	11	45.650.000	0	0	0	0	11	45.650.000
3.05.01.06.011	Barisan bangku kayu	buah	18	9.000.000	0	0	0	0	18	9.000.000
3.05.01.06.012	Tempat tidur besi	buah	12	4.400.000	0	0	0	0	12	4.400.000
3.05.01.06.013	Meja kayu	buah	6	1.100.000	0	0	0	0	6	1.100.000
3.05.01.06.014	Meja makan kayu	buah	1	1.500.000	0	0	0	0	1	1.500.000
3.05.01.06.015	Tempat tidur kayu	buah	10	750.000	0	0	0	0	10	750.000
3.05.01.06.016	Tempat tidur besi	buah	5	31.213.000	0	0	0	0	5	31.213.000
3.05.01.06.017	Tempat tidur kayu	buah	13	7.155.630	0	0	0	0	13	7.155.630
3.05.01.06.018	Tempat tidur besi	buah	6	6.000.000	0	0	0	0	6	6.000.000
3.05.01.06.019	Tempat tidur kayu	buah	1	5.217.450	0	0	0	0	1	5.217.450
3.05.01.06.020	Tempat tidur besi	buah	3	21.524.625	0	0	0	0	3	21.524.625
3.05.01.06.021	Tempat tidur kayu	buah	1	290.000	0	0	0	0	1	290.000
3.05.01.06.022	Tempat tidur besi	buah	20	4.000.000	0	0	0	0	20	4.000.000
3.05.01.06.023	Tempat tidur kayu	buah	1	2.550.000	0	0	0	0	1	2.550.000

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH SYARIAH ACEH

LAPORAN BABANG KUTASA PENGINTA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABIL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELompok LABRANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UKPB : 005.01.05.098.986 PENGADILAN NEGERI SINADANG

Tanggal : 08-01-2020
Halaman : 5
Kode Lap : 1.BG05SKT

KODE	U. RALAN	SAT	SALDO PER		BERTAMBAH		KURANG		SALDO PER	
			1 JANUARI 2019	2	3	4	5	6	7	31 DESEMBER 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.06.02.00.002	Winees Angedder	Buah	11.908,895	0	0	0	0	0	2	11.908,895
3.08.01.12.025	Shedlow	Buah	1.000,000	0	0	0	0	0	1	1.000,000
3.10.01.0.004	Isenrek	Buah	95.400,000	0	0	0	0	0	1	95.400,000
3.00.01.02.001	7.27.000	Buah	79.460,770	0	0	0	0	0	10	79.460,770
3.10.01.02.002	Lap. Tap	Buah	225.180,000	0	0	0	0	0	19	225.180,000
3.10.01.02.003	Kase Book	Buah	36.000,000	0	0	0	0	0	3	36.000,000
3.10.02.01.009	Semil Pinner	Buah	1.570,907,162	0	0	0	0	0	4	1.570,907,162
4.01.21.01.001	Bangunan Gedung Kantor Perikanan	Ura	24.095,192,895	0	0	0	0	0	1	24.095,192,895
TOTAL						196.200,190				24.321,491,075

Sinabang, 31 Desember 2019
Penasihat Jemah UKPB
SEKRETARIS
LUSGA FERIKANTI SH
19880214012122003

LAMPIRAN III
SCREENSHOT TAMPILAN ECOURT DAN SIPP



e - Court
The Electronics Justice System

PDF Print |   Pengadilan Negeri Sinabang ▾

 **Pengadilan Negeri Sinabang**
(Administrator)

-  Dashboard
-  Pendaftaran Perkara ▾
-  Konfigurasi Aplikasi ▾
-  Pengguna Lain ▾
-  Keluar

Daftar Permohonan Online

[Dashboard](#) / [Pendaftaran Perkara](#) / [Permohonan](#)

Daftar Perkara di Pengadilan Anda

Show 10 entries

Search:

No	Kode & Tanggal Register	Status Pembayaran ↑↓ (Konfirmasi Otomatis)	Status Pendaftaran ↑↓	Jumlah Panjar Perkara ↑↓	Nomor Perkara & Tanggal Pendaftaran
1	PN SNB-012020IUR 9 Januari 2020	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar	Rp. 106.000	4/Pdt.P/2020/PN Snb 9 Januari 2020
2	PN SNB-012020X4E 8 Januari 2020	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar	Rp. 106.000	3/Pdt.P/2020/PN Snb 9 Januari 2020
3	PN SNB-012020TO3 8 Januari 2020	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar	Rp. 106.000	2/Pdt.P/2020/PN Snb 8 Januari 2020
4	PN SNB-012020L5L 6 Januari 2020	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 9 Januari 2020	Rp. 106.000	1/Pdt.P/2020/PN Snb 6 Januari 2020
5	PN SNB-1220194JY 11 Desember 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 17 Desember 2019	Rp. 106.000	28/Pdt.P/2019/PN Snb 12 Desember 2019
6	PN SNB-122019DWZ	Sudah Dibayar	Perkara Terdaftar - Putusan	Rp. 106.000	27/Pdt.P/2019/PN Snb



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI SINABANG

[Beranda](#) [Perdata Umum](#) [Perdata Khusus](#) [Pidana](#) [Pidana Khusus](#) [Jadwal Sidang](#) [Laporan](#) [Delegasi](#)

DATA SELURUH PERKARA

Pembaharuan Data : - WIB, Total : 2.778 Perkara

Ketik kata kunci

Cari

Pencarian Detil

Prev

1

2

3

...

138

139

Next

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	2/Pdt.P/2020/PN Snb	08 Jan 2020	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	Pemohon: Nilam Wahyu Ningsih	Sidang pertama	1 Hari	[detil]
2	1/Pdt.P/2020/PN Snb	06 Jan 2020	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	Pemohon: Zulkarnain	Sidang pertama	3 Hari	[detil]
3	1/Pid.B/2020/PN Snb	03 Jan 2020	Penipuan	Penuntut Umum: 1.Solihin, S.H 2.Heri Ikbai, S.H Terdakwa: Noni Afrita Binti Mirwan B	Persidangan	6 Hari	[detil]
4	2/Pid.B/2020/PN Snb	03 Jan 2020	Penipuan	Penuntut Umum: 1.Heri Ikbai, S.H 2.Abdul Basir, S.H Terdakwa: Husaini Bin Alm. Aderan	Persidangan	6 Hari	[detil]
5	28/Pdt.P/2019/PN Snb	12 Dec 2019	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	Pemohon: Hasrianto	Minutasi	5 Hari	[detil]
6	27/Pdt.P/2019/PN Snb	10 Dec 2019	Perbaikan Kesalahan Dalam	Pemohon:	Minutasi	7 Hari	[detil]

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

Versi 3.3.0-1

LAMPIRAN IV
AKREDITASI



LAMPIRAN V
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



LAMPIRAN VI
INOVASI PELAYANAN PUBLIK



INFORMASI TILANG

* Ketik No. Tilang anda kemudian click Info Tilang

No. Tilang

Info Tilang

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan klik [link](#) anda dapat melakukan pencarian dengan menggunakan nama atau nomor polisi

© 2017 - Pengadilan Negeri Sinabang

LAMPIRAN VII
SK HAKIM PENGAWAS BIDANG



**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG
Nomor : W1-U9/101/KP.04.11/1/2019**

**TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN NEGERI SINABANG**

KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG;

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 sebagaimana diubah untuk kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menentukan bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Jurusita;
- b. Bahwa tentang tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Agung RI telah menentukan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994, tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
- c. Bahwa tata cara pengawasandan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut telah pula dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan;
- d. Bahwa untuk dapat lebih mengintensifkan pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut, maka tugas administrasi perlu dibagi dalam bidang-bidang pengawasan administrasi;
- e. Bahwa karena adanya pertimbangan tentang mutasi para Hakim Pengawasan Bidang sehingga jabatan tersebut kosong, maka perlu ada penggantinya;
- f. Bahwa para Hakim yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran dibawah ini dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Peradilan Umum;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/021/SK/III/1988 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/019/SK/VIII/1991 tentang Perubahan/Penyempurnaan Pola-Pola Register Perkara, Keuangan Perkara dan Laporan Perkara;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/003/SK/I/1993 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/003/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/005/SK/III/1994 tentang Pengawasan oleh Mahkamah Agung RI;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan evaluasi atas Hasil pengawasan oleh Pengadilan tingkat banding dan Pengadilan tingkat Pertama;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Pimpinan Pengadilan dalam Melaksanakan Pengawasan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama tentang KMA/071/KMA/SK/V/2008 tentang Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang Berada di bawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN NEGERI SINABANG
- Pertama :** Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Tanggal 01 November 2018 Nomor W1.U9/885/KP.04.11/11/2018 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Sinabang tidak berlaku lagi;

- Kedua : Menunjuk Hakim Pengawas Bidang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar terlampir surat keputusan ini;
- Ketiga : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinabang melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SINABANG
TANGGAL : 02 JANUARI 2019
PENGADILAN NEGERI SINABANG



AFR UDDIN

LAMPIRAN VIII
SK TIM AUDIT INTERNAL



KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG

NOMOR : W1-U9/276B/OT.01.1/1/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDITOR INTERNAL

PADA PENGADILAN NEGERI SINABANG TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Internal maka perlu adanya Tim Auditor Internal dalam membantu pelaksanaan maupun pengawasan pada seluruh bagian dan lapisan terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 ;
 2. Bahwa pengawasan dilakukan secara terencana dan kontinyu terhadap seluruh sistem manajemen untuk mengarah ke perbaikan yang berkelanjutan sesuai sasaran yang diterapkan ;
 3. Bahwa Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Sinabang yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut ;
- MEMPERHATIKAN** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor :1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No. 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No:

- 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2000 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor: W1-U9/265A/OT.01.3/2/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Penunjukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Sinabang ;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor : W1-U9/206/OT.01.1/1/2018 tentang Pembentukan Tim Auditor Internal pada Pengadilan Negeri Sinabang ;
- KEDUA** : Menunjuk nama-nama yang tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Auditor Internal pada Pengadilan Negeri Sinabang ;
- KETIGA** : Tim Auditor Internal pada Pengadilan Negeri Sinabang melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenang sesuai Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya ;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 27 Februari 2019
Ketua Pengadilan Negeri Sinabang,



MUHAMMAD FUDDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh

LAMPIRAN IX
SK TIM MONITORING DAN EVALUASI



**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG
NOMOR : W1-U9/318/KP/3/2019**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI SINABANG TAHUN 2019**

KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa keterbukaan atas informasi dan pelayanan yang efektif dan efisien yang terintegrasi dalam satu kesatuan pelayanan satu pintu merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Sinabang dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
 - b. Bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi peradilan di Pengadilan Negeri Sinabang dilaksanakan melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ;
 - c. Bahwa dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Sinabang, maka perlu menunjuk tim pemeriksa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Sinabang;
 - d. Bahwa pegawai yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut ;
- Memperhatikan** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/I/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan ;

8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial, Nomor : 01/ WKMA-NY/SK/1/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI ;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KM/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2000 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI SINABANG TAHUN 2019.
- KESATU** : Menunjuk Tim Pemeriksa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Sinabang sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Pemeriksa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- KETIGA** : Pelaksanaan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Sinabang dilakukan per-semester ;
- KEEMPAT** : Tim Pemeriksa pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melaporkan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinabang ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab ;

Ditetapkan di : Sinabang
Tanggal : 1 Maret 2019
Ketua Pengadilan Negeri Sinabang,



MUHIYUDDIN

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang
 Nomor : W1-U9/318/PS/3/2019
 Tanggal : 1 Maret 2019

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PENUGASAN
1	2	3	4
1	MUHIFUDDIN, S.H. Nip. 19721212 199403 1 004	Ketua Pengadilan Negeri Sinabang	Pembina
2	RESTU IKHLAS, S.H., M.H. Nip. 19870623 200912 1 005	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Non Teknis
3	RAHMAWAN S.H. Nip. 19850709 200912 1 007	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Teknis
4	ZULKARNAINI, S.H. Nip. 19611101 198203 1 005	Panitera	Koordinator Pemeriksa PTSP Bagian Teknis
5	LINGGA FEBRIYANTI, S.H. Nip. 19890214 201212 2 003	Sekretaris	Koordinator Pemeriksa PTSP Bagian Non Teknis
6	AYON AURIFAN, S.H. Nip. 19850325 200912 1 003	Panitera Muda Pidana	Anggota
7	AULIA ALFACRISY, S.H. Nip. 19891004 201212 1 001	Panitera Pengganti / Plt. Panitera Muda Hukum	
8	PUTRI MAWAR, S.E. Nip. 19841008 201212 2 001	Kasubbag Umum dan Keuangan	
9	ANDI PRANOTO, S.H. Nip. 19840101 201403 1 002	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	
10	RONI Nip. 19831107 201212 1 001	Plt. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Pelaporan	

Ditetapkan di : Sinabang
 Tanggal : 1 Maret 2019
 Ketua Pengadilan Negeri Sinabang,



MUHIFUDDIN
 MUHIFUDDIN



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG
NOMOR : W1-U9/719/OT.01.3/5/2019

TENTANG
REVISI PENUNJUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PADA PENGADILAN NEGERI SINABANG TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG

- MENIMBANG** :
1. Dalam rangka mendukung suksesnya Akreditasi Penjaminan Mutu sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal Nomor : 1639/ DJU/ SK/ OTO 1.1/ 9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001 - 2008 ;
 2. Bahwa Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent -ICPE);
 3. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut perlu membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu;
 4. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Sinabang ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Akreditasi Penjaminan Mutu ;
- MEMPERHATIKAN** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No. 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2000 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 599/DJU/HK/007/VI/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Lingkungan Peradilan Umum ;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG TENTANG REVISI
PENUNJUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN
NEGERI SINABANG TAHUN 2019
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor :
W1.U9/265/OT.01.3/2/2019 Tanggal 27 februari 2019 Tentang Tim
Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Sinabang ;
- KEDUA** : Menunjuk kembali tim kerja untuk pelaksanaan Akreditasi Penjaminan
Mutu Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2019 ;
- KETIGA** : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri
Sinabang;

Ditetapkan di : Sinabang
Tanggal : 20 Mei 2019
Ketua : Pengadilan Negeri Sinabang,



di 11: DDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang
 Nomor : W1-U9/719/OT.01.3/5/2019
 Tanggal : 20 Mei 2019

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	MUHIFUDDIN, S.H., M.H. Nip. 19721212 199403 1 004	KETUA	KETUA PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI (PMPN)
2	RESTU IKHLAS, S.H., M.H. Nip. 19870623 200912 1 005	HAKIM PRATAMA MADYA	MANAGER REPRESENTATIVE (MR)
3	ZULKARNAINI, S.H. Nip. 19601101 198203 1 005	PANITERA	WAKIL I MANAGER REPRESENTATIVE (WKMR I)
4	LINGGA FEBRIYANTI, S.H. Nip. 19890214 201212 2 003	SEKRETARIS	WAKIL II MANAGER REPRESENTATIVE (WKMR II) / DOCUMENT CONTROL (DC)
5	RAHMAWAN, S.H. Nip. 19850709 200912 1 007	HAKIM PRATAMA MADYA	INTERNAL AUDITOR (IA)
6	PUTRI MAWAR, S.E. Nip. 19841008 201212 2 001	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	ANGGOTA DOCUMENT CONTROL (DC)
7	ANDI PRANOTO, S.H. Nip. 19840101 201403 1 002	KASUBBAG PERENCANAAN, IT & PELAPORAN	ANGGOTA DOCUMENT CONTROL (DC)
8	WAHYU SANTOSA, S.E. Nip. 19920320 201903 1 006	STAF KEPEGAWAIN & ORTALA	ANGGOTA DOCUMENT CONTROL (DC)
9	NANDA BERTHA AZORA, A.Md Nip. 19871114 201505 2 001	STAF UMUM & KEUANGAN	ANGGOTA DOCUMENT CONTROL (DC)
10	AYON AURIFAN, S.H. Nip. 19850325 200912 1 003	PANITERA MUDA PIDANA	KETUA TIM SURVEY KEPUASAN PENCARI KEADILAN
11	AULIA ALFACRISY, S.H. Nip. 19891004 201212 1 001	PANITERA PENGGANTI	TIM SURVEY KEPUASAN PENCARI Keadilan

12	SAHARA TARIGAN, S.H. Nip. 19840906 201101 2 005	STAF KEPANITERAAN	TIM SURVEY KEPUASAN PENCARI Keadilan
13	RONI Nip. 19831107 201212 1 001	STAF KEPEGAWAIN & ORTALA	TIM SURVEY KEPUASAN PENCARI Keadilan
14	SAFLIN Nip. 19760708 200504 1 001	STAF UMUM & KEUANGAN	TIM SURVEY KEPUASAN PENCARI Keadilan

Ditetapkan di : Sinabang
Tanggal : 20 Mei 2019
Ketua Pengadilan Negeri Sinabang,



W. H. UDDIN



**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG
NOMOR W1-U9/741/OT.01.3/7/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PENGADUAN
PADA PENGADILAN NEGERI SINABANG TAHUN 2019**

KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk menjaga citra dan wibawa lembaga peradilan serta merespon keluhan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain maupun dari internal Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II Makaa perlu disediakan meja pengaduan yang berkedudukan di kantor Pengadilan Negeri Sinabang;
 - b. Bahwa tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan telah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Tim Pemeriksa Pengaduan di Pengadilan Negeri Sinabang ;
 - d. Bahwa nama-nama yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran di bawah ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan

Baadan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;

10. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/SKB/MA/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-44/KMA/SK/I/2011 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PENGADUAN PADA PENGADILAN NEGERI SINABANG TAHUN 2019
PERTAMA	: Membentuk Tim Pemeriksa Pengaduan Pengadilan Negeri Sinabang dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
KEDUA	: Tugas Tim Pemeriksa Pengaduan Pengadilan Negeri Sinabang adalah melaksanakan analisa dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinabang;
KETIGA	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


 : Sinabang
 : 16 Juli 2019
KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG,

MUHIFUDDIN

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang

Nomor : W1-U9/741/OT.01.3/7/2019
Tanggal : 16 Juli 2019

**SUSUNAN TIM PEMERIKSA PENGADUAN
PADA PENGADILAN NEGERI SINABANG**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MUHIFUDDIN, S.H., M.H. 19721212 199403 1 004	Ketua	Pelindung
2.	RESTU IKHLAS, S.H., M.H. 19870623 200912 1 005	Hakim	Ketua Tim
3.	RAHMAWAN, S.H. 19850709 200912 1 007	Hakim	Anggota
4.	ZULKARNAINI, S.H. 19611101 198203 1 006	Panitera	Anggota
5.	LINGGA FEBRIYANTI, S.H. 19890214 201212 2 003	Sekretaris	Anggota
6.	AYON AURIFAN, S.H. 19850325 200912 1 003	Plt. Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	RONI 19831107 201212 1 001	Plt. Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris / Notulen

Ditetapkan di : Sinabang
Tanggal : 16 Juli 2019
KE-134 PENGADILAN NEGERI SINABANG,


M.H. MUHIFUDDIN

LAMPIRAN X LAPORAN POSBAKUM

PANITIA SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS PELAYANAN HUKUM (POSYANKUM) PENGADILAN NEGERI SINABANG

PENGUMUMAN

Berdasarkan berita acara Evaluasi dan Seleksi lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Sinabang pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 dengan ini diumumkan bahwa yang paling memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan, adalah :

Nama Lembaga Penyedia Layanan Pos Bantuan Hukum :

LEMBAGA KAJIAN BANTUAN HUKUM (LKBH) SIMEULUE

Tanpa mengurangi rasa hormat, kami Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Sinabang;

Demikian, pengumuman ini untuk dapat diketahui khalayak dan harap maklum.

Sinabang, 11 Januari 2019
Ketua Panitia,



AYON AURIFAN, S.H.

BUKU REGISTER POSBAKUM PENGADILAN

Laporan Bulan Januari 2019

NO	TGL	IDENTITAS PEMOHON	KEDUDUKAN PEMOHON	JENIS DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN	JENIS LAYANAN YANG DITERIMAH	NAMA PEMBERI JASA	NAMA ORGANISASI PEMBERI JASA	KET
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	14/01/2019	Rifawati Arbi	Terdakwa	Dakwaan	Konsultasi	HERMAN HIDAYAT, SH	LKBH-SIMEULUE	
2	17/01/2019	SAIFUDDIN, AR	Terdakwa	Dakwaan	Konsultasi	HERMAN HIDAYAT, SH	LKBH-SIMEULUE	
3	22/01/2019	OLAN FERMADE	Terdakwa	Tuntutan	Konsultasi	ANDRI RUSTIKA, S.H	LKBH-SIMEULUE	
4	28/01/2019	BAYU	Pemohon	Pemohonan	Konsultasi	ANDRI RUSTIKA, S.H	LKBH-SIMEULUE	

BUKU REGISTER POSBAKUM PENGADILAN **Laporan Bulan Februari 2019**

NO	TGL	IDENTITAS PEMOHON	KEDUDUKAN PEMOHON	JENIS DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN	JENIS LAYAMAN YANG DITERIMAH	NAMA PEMBERI JASA	NAMA ORGANISASI PEMBERI JASA	KET
1	04/02/2019	Mursal Umar 68 Tahun Wiraswada Desa Suka Karya	Pemilik Tanah	Foto copy A/B	Konsultasi	ANDRI RUSTIKA, S.Hi	LKBH SIMEULUE	
2	12/02/2019	Darmiati Binti. Abdul Mutalib Ibu Rumah Tangga Desa Suka Maju 45 Tahun	Orang Tua Korban Anak	Surat Panggilan Sidang	Konsultasi	HERMAN HIDAYAT, SH	LKBH-SIMEULUE	
3	12/02/2019	Amzen Als Joam Bin. Sultan Zaini 51 Tahun Desa Suka Maju	Terdakwa	Surat Dakwaan	Konsultasi dan penunjukan Penasihat Hukum	HERMAN HIDAYAT, SH	LKBH-SIMEULUE	
4	21/02/2019	Yogi Suol Ramadani Bin. Markuding 15 Tahun, Pelajar SMP Desa Kuta Padang	Anak (Terdakwa)	Surat Dakwaan	Konsultasi dan penunjukan Penasihat Hukum	HERMAN HIDAYAT, SH	LKBH-SIMEULUE	

NO	TGL	IDENTITAS PEMOHON	KEDUDUKAN PEMOHON	JENIS DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN	JENIS LAYANAN YANG DITERIMAH	NAMA PEMBERU JASA	NAMA ORGANISASI PEMBERU JASA	KET
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	21/3/2019	JANUAR 51 Tahun Mesyan Desa Suka Jaya Lab-laki	Orang Tua Anak	Fotocopy KTP	Konsultasi	HERMAN HIDAYAT, SH ANDRI RUSTIKA, S.HI	LKBH-SIMEULUE	
2	21/3/2019	SYOPHAN, R 48 Tahun Widawati Desa Suka Jaya Lab-laki	Orang Tua Anak	Fotocopy KTP	Konsultasi	HERMAN HIDAYAT, S.H ANDRI RUSTIKA, S.HI	LKBH-SIMEULUE	
3	21/3/2019	MASUDIN 50 Tahun Nelayan Desa Suka Jaya Lab-laki	Orang Tua Anak	Fotocopy KTP	Konsultasi	HERMAN HIDAYAT, SH ANDRI RUSTIKA, S.HI	LKBH-SIMEULUE	

NO	TGL	IDENTITAS PEMOHON	AKR. NAMA/ PEMOHON	JENIS DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN	JENIS LAYANAN YANG DITERIMA	NAMA PEMBERI JASA	NAMA ORGANISASI PEMBERI JASA	KET
1	08/04/2019	KEB AMTAMA 28 Tahun Carawan Kontak Jasa Suka Maju-Sin Tiin Perempuan	Pemohon Beking	Foto Copy KTP	Konsultasi	ANDRI RUSTIKA, S.HI	LKBH-SIMEULUE	
2	18/04/2019	MEGAWATI 65 Tahun Pensiunan PNS Sahur Lakun Ket Tep Barat Perempuan	Ahli Waris	Foto Copy KTP	Membantu membuat Dokumen	ANDRI RUSTIKA, S.HI	LKBH-SIMEULUE	
3	29/04/2019	RADUS 47 Tahun Peterng/Pedebun Desa Luan Soreg, Sin Tene Laki-laki	Tendagor	Foto Copy KTP	Konsultasi	HERMAN Hidayat SH	LKBH-SIMEULUE	

B.14

BUKU REGISTER POSBAKUM PENGADILAN

Laporan Bulan Mei 2018

NO	TGL	IDENTITAS PEMOHON	KEDUDUKAN PEMOHON	JENIS DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN	JENIS LAYANAN YANG DITERIMA	NAMA PEMBERI JASA	NAMA ORGANISASI PEMBERI JASA	KET
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	09/05/2018	MASNUDDIN 40 Tahun Wirsawasta Desa Suka Jaya Laki-laki	Pemohon	Foto Copy KTP	Kontribusi Ng CB	ANDRI RUSTIKA, S.HI	LKBH-SIMEULUE	
2	18/05/2018	MEGAWATI 65 Tahun Pensiunan PNS Salur Lutan Koc Tepi Barat Perempuan	Pengungsi	Foto Copy KTP	Membantu membuat Bukti Surat	HERMAN HIDAYAT, SH	LKBH-SIMEULUE	
3	27/05/2018	RADULIS 47 Tahun Petani/Petebun Desa Luan Sorep, Sim Leng Laki-laki	Tetap	Foto Copy KTP	Kontribusi	HERMAN HIDAYAT, SH	LKBH-SIMEULUE	

NO	TGL	IDENTITAS PEMOHON	KEDUDUKAN PEMOHON	JENIS DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN	JENIS LAYANAN YANG DITERIMA	NAMA PEMBERI JASA	NAMA ORGANISASI PEMBERI JASA	KET
1	13/06/2019	HASANUDDIN 40 Tahun Wiraswasta Desa Saki Jaya Labi-labi	Pemohon	Foto Copy KTP	Konsultasi	ANDRI RUSTIKA, S.HI	LKBH-SIMEULUE	
2	17/06/2019	MEGAWATI 65 Tahun Pensiunan PNS Salur Labun Kec. Tepi Barat Perempuan	Pengugat	Foto Copy KTP	Membantu membuat Bukti Surat	HERMAN HIDAYAT, SH	LKBH-SIMEULUE	
3	24/06/2019	RADUS 47 Tahun Petani/Peternak Desa Luan Serep, SimTeng Labi-labi	Tetapori	Foto Copy KTP	Konsultasi	HERMAN HIDAYAT, SH	LKBH-SIMEULUE	

BUKU REGISTER POSBAKUM PENGADILAN

Laporan Bulanan Juli 2019

A NO	B TGL	C IDENTITAS PEMOKON	D KEJADIKAN PEMOKON	E JENIS DOKUMEN YANG DILAMPUNGKAN	F JENIS LAYANAN YANG DITERIMA	G NAMA PEMERIK JASA	H NAMA ORGANISASI PEMERIK JASA	I KET
1	08/07/2019	HASANUDDIN 40 Tahun Widyawarta Desa Suka Jaya Lab-lab	Pemohon	Foto Copy KTP	Konsultasi	ANDRI RUSTIKA, S.H	LKBH-SIMEULUE	
2	18/07/2019	MEGAWATI 65 Tahun Pensiunan PNS Salur Laili, kec. Teo Barat Perempuan	Pengingat	Foto Copy KTP	Membantu membuat Bukti Surat	HERMAN HIDAYAT, SH	LKBH-SIMEULUE	
3	25/07/2019	RADULS 47 Tahun Petani/Petebun Desa Luan Sorep, Sirteng laki laki	Tertapar	Foto Copy KTP	Konsultasi	HERMAN HIDAYAT, SH	LKBH-SIMEULUE	

8.14

BUKU REGISTER POSBAKUM PENGADILAN

Laporan Bulat Agustus 2019

NO	TGL	IDENTITAS PEMOHON	KELUARGAAN PEMOHON	JENIS DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN	JENIS LAYANAN YANG DITERIMAH	NAMA PEMBERI JASA	NAMA ORGANISASI PEMBERI JASA	KET
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	02/08/2019	Nuraida 61 Tahun Ibu Rumah Tangga Desa Suka Jaya Perempuan	Pemilik Tanah	Sampkat Hak Milik tanah	Konsultasi mengenai Somasi	Andri Ruslika, S.Hi	LKBH Simbulue	
2	20/08/2019	Samudin D T Bhurilak-laki Pecani Angkoo Kec: Taupan Barat	Dengugat	Surat Gugatan	Konsultasi	Andri Ruslika, S.Hi	LKBH Simbulue	
3	26/08/2019	Tooi saputris Etn Samula 02-Jan-68 Wirawastir Uyasa Laeyon Laki laki	Anak Dengugat	Surat Gugatan	Pemohonan surat kuasa insidentil	Herren Hidayat, SH.	LKBH Simbulue	

8.14

BUKU REGISTER POSBAKUM PENGADILAN

Laporan Bulan September 2019

NO	TGL	IDENTITAS PEMOHON	KEDUDUKAN PEMOHON	JENIS DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN	JENIS LAYANAN YANG DITERIMA	NAMA PEMBERI JASA	NAMA ORGANISASI PEMBERI JASA	KET
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	02/09/2019	Tot papulis Bin Samith 02-Jen-68 Wataswasta Desa Lajyon Laki-laki	Kuasa Penggugat	Surat Gugatan	Konsultasi perubahan Gugatan	Herman Hidayat, SH.	LKBH Simetulle	
2	10/09/2019	Isan Campin 40 Tahun Wataswasta Desa Arigmo Laki-laki	Tergugat	Surat Gugatan	Konsultasi	Ayich Rusika, S.HI	LKBH Simetulle	
3	18/09/2019	Rumina 34 Tahun Wataswasta Desa Sindang Laki-laki	Kesihir	Foto Copy KTP	Konsultasi	Herman Hidayat, S.HI	LKBH Simetulle	
4	23/09/2019	BPN Simeulle	Turut Tergugat	Foto copy KTP	Konsultasi mengenai Surat Kuasa Substitusi	Ardi Rusika, S.HI	LKBH Simetulle	
5	28/09/2019	Saad M. Hasyim 49 Tahun Wataswasta Desa Suka Karya Laki-laki	Pemohon	Foto Copy KTP Foto copy akte kelahiran	Konsultasi	Herman Hidayat, S.HI	LKBH Simetulle	

NO	TGL	IDENTITAS PEMOHON	KEUDUKAN PEMOHON	JENIS DOKUMEN YANG DI AMPIRKAN	JENIS LAYANAN YANG DITERIMAH	NAMA PEMBERI JASA	NAMA ORGANISASI PEMBERI JASA	KET
1	03/10/2019	Toni saputra Bin Samidin 02-Jan-03 Wiraswasta Desa Layan Laki laki	Kusa Pengugat	Surat Budi	Konsultasi	Herman Hidayat, SH.	LKBH Simelue	
2	08/10/2019	Mona Monika 22 Tahun Taneja Bakti Desa Suka Maju Perempuan	Pemohon	AKB Kelahiran	Konsultasi	Ancil Rustika, S.H	LKBH Simelue	
3	14/10/2019	Tom saputra Bin Samidin 02-Jan-88 Wiraswasta Desa Layan Laki laki	Kusa Pengugat	Surat Gugatan pembatalan	Konsultasi	Herman Hidayat, S.H.	LKBH Simelue	
4	18/10/2019	Iwan Chaplin 40 Tahun Wiraswasta Desa Angkeo Laki-Laki	Pengugat	Foto copy KTP	Konsultasi mengenai Sidang Pemeriksaan sempoa	Andin Rustika, S.H.	LKBH Simelue	
5	23/10/2019	Dani Rachman 30 Tahun Wiraswasta	Terdakwa	Foto Copy KTP dan Surat Tunutan	Konsultasi	Herman Hidayat, S.H	LKBH Simelue	

8.14

BUKU REGISTER POSBAKUM PENGADILAN

Laporan Bulan November 2019

NO	TGL	IDENTITAS PEMOHON	KENDUDIKAN PEMOHON	JENIS DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN	JENIS LAYANAN YANG DITERIMAH	NAMA PEMBERI JASA	NAMA ORGANISASI PEMBERI JASA	KET
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	08/11/2018	Kafar 10-Np-74 IRT Desa Al' Ungin Perenguar	Pemohon	Surat Bukti	Konsultasi	Herman Hidayat, SH	LKBH Simbulu	
2	18/11/2019	Evi Susant 10/12/1996 Manasawa Desa Labuhan Bakti Perenguar	Pemohon	Akta Kelahiran	Konsultasi	Andri Rustika, S.H	LKBH Simbulu	
3	20/11/2018	Yulhanis 02-Jan-89 Wijawasta Desa Lelayon Laki-laki	Kuasa Penguar	Surat Gugatan perubahan	Konsultasi	Herman Hidayat, S.H	LKBH Simbulu	

NO	TGL	IDENTITAS PEMOHON	KEDUDUKAN PEMOHON	JENIS DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN	JENIS LAYANAN YANG DITERIMA	NAMA PEMBERI JASA	NAMA ORGANISASI PEMBERI JASA	KET
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	02-Dec-19	LUSIAN Adi Tatin Wataswasta Desa Sintang Sin Tin Lab-BM	Tengusit		Konsultasi	ANDRI RUSTIKA, S.H	JKB-SMEULUE	
2	09-Dec-19	MONDAR HUSEN Lt. Tatin Wataswasta Desa Lingi Sin Tin Lab-BM	Pertilik Tanah	Foto Copy KTP	Konsultasi	HERMAN HIDAYAT, SH	LEKH-SMEULUE	
3	12-Dec-19	Ton Sapura 30 Tatin Wataswasta Desa Lasyan Lab-BM	Ahi Wato	Foto Copy KTP	Konsultasi	ANDRI RUSTIKA, S.H	LEKH-SMEULUE	

